

**DINAMIKA GERAKAN KESETARAAN GENDER  
DI ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS  
(ORMEK)**

**(STUDI DESKRIPTIF MENGENAI DINAMIKA GERAKAN  
KESETARAAN GENDER DI ORMEK HMI DAN LMND CABANG  
SURABAYA)**

**SKRIPSI**

File 0 2007  
100  
5



**OLEH :**

**HANNY CHRISTINA**  
**NIM. 070216750**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA  
2006/2007**



**DINAMIKA GERAKAN KESETARAAN GENDER  
DI ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS  
(ORMEK)**

**(STUDI DESKRIPTIF MENGENAI DINAMIKA GERAKAN  
KESETARAAN GENDER DI ORMEK HMI DAN LMND CABANG  
SURABAYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**OLEH :**

**HANNY CHRISTINA**  
**NIM. 070216730**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA  
2006/2007**

**DINAMIKA GERAKAN KESETARAAN GENDER  
DI ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS  
(ORMEK)**

**(STUDI DESKRIPTIF MENGENAI DINAMIKA GERAKAN  
KESETARAAN GENDER DI ORMEK HMI DAN LMND CABANG  
SURABAYA)**

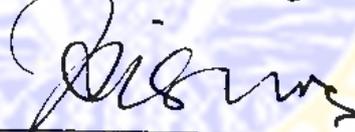
**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**HANNY CHRISTINA**  
**NIM. 070216750**

**Telah Disetujui dan Diterima Dengan Baik Oleh :**

**Dosen Pembimbing**



**Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si**  
**NIP. 1314531241**

**Surabaya, 13 Juni 2007**

**DINAMIKA GERAKAN KESETARAAN GENDER  
DI ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS  
(ORMEK)**

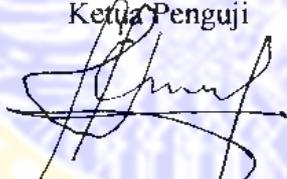
**( STUDI DESKRIPTIF MENGENAI DINAMIKA GERAKAN  
KESETARAAN GENDER DI ORMEK HMI DAN LMND CABANG  
SURABAYA )**

Disusun Oleh :

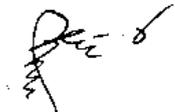
Hanny Christina  
NIM.070216750

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Juli 2007  
Dan telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima

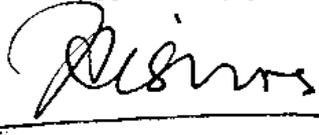
Tim Penguji,  
Ketua Penguji

  
Dra. Dwi Windyastuti, MA.  
NIP.131801643

Anggota Penguji I

  
Drs. Haryadi, M.Si.  
NIP.131653466

Anggota Penguji II

  
Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si.  
NIP.1314531241

### **Kata Pengantar**

Dengan banyak mengucapkan syukur dan berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyatakan bahwa tugas akhir berupa karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini telah selesai dikerjakan. Thank You Jesus Christ. Akhirnya!!

Terlepas dari berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi, penulis dengan bangga dapat mempersembahkan karya ini tidak hanya sebagai tuntutan akademis dalam usaha memperoleh gelar sarjana strata-1, tetapi juga sebagai cerminan hasil mengenyam ilmu di perguruan tinggi selama 5 tahun.

Kiranya skripsi ini, dengan segala kekurangannya, dapat berguna tidak hanya bagi mahasiswa Ilmu Politik pada khususnya, tetapi juga bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya. Untuk itu penulis membuka diri pada masukan semua pihak atas karya tulis skripsi ini yang disadari jauh dari sempurna.

Akhir kata, penulis berterima kasih pada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pengerjaan karya tulis ini.

Surabaya, Juni 2007

Hanny Christina

..  
..  
...

...untuk kedua orang tua ku...

...papa yang nggak sempat lihat anaknya jadi sarjana...

...dan...

...mama yang senantiasa berjuang membesarkan anak-anaknya...

...serta persembahkan untuk...

...kakak-kakakku...

...yang telah memungkinkanku untuk meraih semua ini...

...  
..  
..

### Ucapan Terima Kasih

Atas terselesaikannya tugas akhir penulisan skripsi ini, yang memakan waktu tidak singkat, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada :

1. Bapak Wisnu Pramutanto Msi., selaku dosen pembimbing skripsi yang selama ini telah banyak bersabar dan memberikan bimbingan bagi penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu serta masukan yang telah diberikan.
2. Para dosen penguji skripsi : Bu Henny, Pak Haryadi dan Pak Wisnu.
3. Ibu Siti Aminah selaku dosen wali yang telah banyak memberi ilmu serta bimbingan.
4. Teristimewa, rasa terima kasih ditujukan pada semua Informan yang telah memberikan banyak informasi dan meluangkan waktu bagi penulis. Untuk Juwita, Irina, Isnaini, Rudi, Vivid an Elisa, thanks a lot. Juga banyak terima kasih untuk teman-teman HMI dan LMND lainnya.
5. Teman-teman se-angkatan 2002, The Freaks!, yaitu : Lala (ingat slalu buku fave qta: He Just Not That Into You!), Vita (alias jaran alias tenyom alias ombo, tapi apapun namanya : tetep ngulang seminar 4x berturut-turut!), Andhi Mahligai (he3, aku kalah 1 semester dari km ndi), Sandy (Jak Rujak), M Ludfi (my man, tambah cakep aj), M.J.B (Unbelieveable & Unpredictable), Ames (ibu yg satu ini, jgn sampe lupa kuliah ya), Imam (calon proyektor masa depan), Hadi (ayo cepetan bikin skripsinya), Angga ( gimana kabarnya skripsi yang udah dibikin dari semester ??), Yazid & Ali (yang telah mendahului kita semua, lulusnya

- maksudku), and Kukuh. Juga buat teman-teman 2002 lainnya : mbah ulum and Joy!.
6. Gank plus-plus tergeger sepanjang masa : BemBie! Plus malu, plus utang, plus gak tau diri, plus macak enom...tetep...opo ae ta' lakoni pokok gratis! Vita si Lembok1, Nyonya Dian si Lembok2, Iiz Olivia si Achal, dan juga Natree si BemBieBaru....U gals r the best!
  7. Makasih banyak buat Kresek & Mbak Dian atas segala bantuannya, bener-bener pertolongan yang tiada tara.
  8. Segenap anak-anak politik lainnya, yang telah membuat kehidupan perkuliahan penufis penuh dengan warna selama 5 tahun terakhir : Boluz, Reno, Ai, Trisna, Antoq si..., Jeng Elok, To'ing, Ali Gandul, Gelar, Vicky, Sasha, Juwita lagi, Mas Abul dan semua kakak-kakak dan adik-adik kelas yang namanya tidak dapat disebutkan disini.
  9. Tidak terlupakan, teman-teman sejawat sewaktu meniti karier dihamparan rumput hijau yang terbentang luas, huahahaha, Trio Nyambek yang heboh : Ulieq si Nyambek2 dan Heru si Nyambek3. Juga buat Bona yang baik dan Dina si Ibu Manager.
  10. Buat Ibu-ibu tempoe doeloe : Lia, Atique, Ika, Reny, Nyoya Emil and Nirma, kapan ya kita bisa arisan lagi,?
  11. Bapak 'pembimbing skripsi pribadi', thanks a lot ya bro. I cant do it without you...
  12. Untuk seseorang yang telah membuat hidup ini HipHipHura dan menceriakan suasana, cieeeee, makasih ya. Pokoknya kamu deh yang paling sipppp.

13. One,! Makasih banyak ya buat semangat yang selama ini diberikan.
14. Dan tak lupa, rasa terima kasih yang tulus untuk seorang sahabat dan saudara, yang pernah menjadi tempat berbagi, menemani disaat-saat sedih dan sendiri, dan terlepas dari semua yang telah terjadi, dia takkan pernah terganti dan selalu ada dihati..... Terima Kasih.

.....*Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya*.....

Surabaya Juni 2007,

Hanny Christina



Departemen Pendidikan Nasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga  
Surabaya

### Abstrak

Nama : Hanny Christina  
NIM : 070216750  
Judul : Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender di Ormek (Studi Deskriptif Mengenai Gerakan Kesetaraan Gender di Ormek HMI dan LMND Cabang Surabaya)  
Halaman : IX + 103 halaman + 3 lembar lampiran  
Pustaka : 1992 – 2004  
13 buku, 2 jurnal, 1 laporan penelitian, 1 skripsi, internet

Penelitian ini berjudul Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender di Ormek (Studi Deskriptif Mengenai Kesetaraan Gender di Ormek HMI dan LMND Cabang Surabaya), yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kepentingan dilakukannya gerakan kesetaraan gender dalam ormek, strategi yang dilakukan ormek dalam menggalang ideologi kesetaraan gender, serta hambatan-hambatan yang ditemui ormek dalam melakukan gerakan kesetaraan gender. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara terbuka dan data yang diperoleh akan diinterpretasikan menggunakan kerangka teori yang relevan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : pertama, gerakan kesetaraan gender yang ada dalam ormek merupakan kepentingan sebagian orang dalam organisasi yang tergabung dalam badan khusus dalam organisasi. Dimana hal ini menunjukkan adanya pluralitas dalam ormek. Kedua, strategi yang dilakukan ormek dalam menggalang ideologi kesetaraan gender adalah melakukan sosialisasi dalam bentuk pendidikan. Hal ini digunakan sebagai strategi utama menuju proses perubahan secara bertahap dan akan memakan waktu yang lama. Dan lebih lanjut ormek berusaha memperjuangkan kepentingan tersebut dalam tataran yang lebih tinggi, yaitu mengusahakan adanya kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan perempuan. Dan yang ketiga, hambatan gerakan kesetaraan gender didalam ormek terjadi secara teknis dan organisasional. Secara teknis, kegiatan dengan isu gender sering berbenturan dengan program kegiatan ormek yang lain. Sedangkan secara organisasional, hambatannya adalah kekurangan SDM dalam organisasi.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul 1 .....	i
Halaman Judul 2 .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Lembar Persembahan .....	vi
Ucapan Terima kasih .....	vii
Abstrak .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>Bab I    Pendahuluan</b> .....	<b>I-1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah .....	I-1
I.2. Rumusan Masalah .....	I-13
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	I-13
I.4. Kerangka Teoritik .....	I-14
I.5. Konseptualisasi .....	I-28
I.6. Definisi Operasional .....	I-31
I.7. Metode Penelitian .....	I-32
<b>Bab II    Deskripsi Umum Lokasi dan Obyek Penelitian</b> .....	<b>II-1</b>
II.1. Kota Surabaya .....	II-1
II.2. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek) .....	II-9
II.2.1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) .....	II-9
II.2.2. Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) .....	II-30
<b>Bab III   Temuan dan Interpretasi Data</b> .....	<b>III-1</b>
<b>Bab IV    Interpretasi Teoritik</b> .....	<b>IV-1</b>
<b>Bab V     Penutup</b> .....	<b>V-1</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>V-3</b>
<b>Lampiran</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1.Latar Belakang Masalah

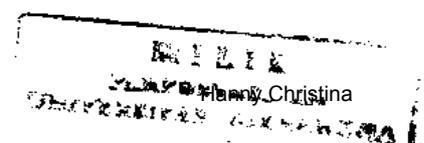
Gerakan untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah suatu perjuangan umat manusia untuk mendapat keadilan sosial, yang telah lama dilakukan sejak tumbuhnya kesadaran akan adanya penindasan yang terjadi pada perempuan namun hingga kini belum mencapai tahapan yang ideal. Oleh karena itu perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia haruslah dilakukan secara bersama-sama, tidak dipandang sebagai perjuangan perempuan melawan laki-laki, yang mana memerlukan partisipasi semua pihak dalam segala bentuk.

Gerakan pembebasan perempuan dari ketidakadilan gender merupakan gerakan yang sudah tua namun baru mengemuka pada tahun 1960an di Amerika sebagai bagian dari kultur radikal termasuk gerakan hak-hak sipil (civil rights) dan kebebasan seksual (sexual liberation).<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri benih-benih gerakan perempuan telah ada dan mendapat ruang sejak masa pemerintahan presiden Soekarno, antara lain dengan adanya kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk dapat mengenyam pendidikan.<sup>2</sup> Pada waktu itu gerakan yang ada disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, meskipun wacana mengenai kesetaraan gender masih jauh tercetus dalam benak pemikiran,

---

<sup>1</sup> DR.Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 106.

<sup>2</sup> A.Nunuk P.Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua* (Magelang: IndonesiaTera, 2004), hlm. xxv. Dijelaskan pula bahwa pada kurun waktu 1946-1965 kaum perempuan telah turut ambil bagian dalam tiap aksi demonstrasi dimuka umum, terutama menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan masalah kemiskinan yang tengah merajalela. hlm. 21



tetapi kesadaran akan eksistensi dan kemauan untuk memperjuangkan taraf hidup perempuan untuk menjadi lebih baik telah tercipta.

Tumbangnya orde lama yang digantikan dengan orde baru turut membawa perubahan terhadap gerakan perempuan Indonesia. Orde baru menyingkirkan dan mengubah pencitraan terhadap perempuan yang sama sekali berbeda dengan orde lama. Orde baru kemudian mengembangkan paham 'ibuisme', yang secara tidak langsung sebagai cara untuk membatasi gerak perempuan di lingkungan domestik semata, serta untuk membangun citra perempuan sebagai pendamping suami.<sup>3</sup> Image ini dituangkan serta disosialisasikan dalam organisasi-organisasi perempuan bentukan orde baru seperti PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan lain lain.

Dalam perjalanannya, seluruh upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender tidak lepas dari berbagai kendala baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, negara turut melakukan penindasan terhadap perempuan sebagaimana tindakan yang dilakukan orde baru dalam meminggirkan perempuan melalui paham 'ibuisme'-nya. Secara kultural kendala datang dari budaya yang telah berakar dan dipegang teguh oleh masyarakat dan juga nilai-nilai agama yang menjadi dasar legitimasi yang ampuh bagi ketidakadilan gender yang terjadi. Bahkan gerakan memperjuangkan kesetaraan gender itupun menjadi hambatan bagi perkembangannya. Gerakan menuju kesetaraan gender dianggap bersifat elitis, karena kesadaran mengenai gerakan tersebut masih merupakan gerakan yang dilakoni oleh kaum menengah dan elite intelektual.<sup>4</sup> Inilah salah satu kendala mengapa kesetaraan gender susah untuk

---

<sup>3</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Ibid*, hlm. 17.

<sup>4</sup> DR.Mansour Fakih, *Op.Cit.*, hlm. 112.

diwujudkan, karena gerakan ini kurang menyentuh masyarakat bawah. Sehingga yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar mampu menjangkau lapisan akar rumput. Disinilah peran mahasiswa sebagai kaum terpelajar calon elite intelektual untuk memikirkan bagaimana cara untuk menuangkan wacana kesetaraan gender dalam bentuk konkrit agar mampu menjangkau lapisan akar rumput.

Sebagaimana dijelaskan diatas, negara turut melakukan penindasan terhadap perempuan melalui kebijakan yang menyinggirkan perempuan maupun dengan kebijakan yang tidak mendukung kemajuan taraf hidup perempuan. Dalam menanggapi fenomena ini, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk dapat ambil bagian dalam gerakan mewujudkan kesetaraan gender. Mahasiswa sebagai kekuatan politik memiliki ciri khas sebagai kekuatan oposisi kepada negara, dan bisa dibilang bahwa kekuatan oposisi yang paling konsisten terhadap negara adalah mahasiswa.<sup>5</sup>

Sejarah panjang gerakan mahasiswa serta aktivitas organisasi kemahasiswaan telah lama dimulai semenjak bangsa Indonesia masih berada dalam kolonialisasi Belanda. Pada masa prakemerdekaan tersebut terdapat tiga generasi angkatan muda Indonesia beserta misi yang mereka emban masing-masing yaitu: angkatan 1908 sebagai penggerak kebangkitan nasionalisme, angkatan 1928 sebagai pencetus Sumpah Pemuda, dan angkatan 1945 sebagai pelaku revolusi kemerdekaan.<sup>6</sup> Sedangkan pasca kemerdekaan, gerakan

<sup>5</sup> Drs. Aribowo, *Sejarah, Pola, dan Format Gerakan Mahasiswa Indonesia : Studi Tentang Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Yogyakarta* (Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1997), hlm. iv.

<sup>6</sup> Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 11.

mahasiswa serta aktivitas organisasi kemahasiswaan termanifestasikan dalam gelombang aksi mahasiswa pada tahun 1966, 1974, 1978 serta pada akhirnya melahirkan peristiwa bersejarah gerakan mahasiswa 1998. Perbedaan antara kedua generasi gerakan mahasiswa pra serta pasca kemerdekaan adalah musuh yang mereka hadapi. Apabila gerakan mahasiswa pra kemerdekaan menghadapi 'bangsa asing' sebagai musuh bersama, maka gerakan mahasiswa pasca kemerdekaan harus menghadapi 'bangsa sendiri' yang telah menyelewengkan kekuasaan sebagai musuhnya.

Organisasi mahasiswa modern yang pertama kali berdiri pada jaman prakemerdekaan adalah Boedi Oetomo pada tahun 1908, yang sebagian besar aktivis-aktivisnya adalah mahasiswa yang berasal dari sekolah kedokteran STOVIA di Jakarta.<sup>7</sup> Kemudian berturut-turut hingga tahun 1945 mulai bermunculan organisasi-organisasi mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik kaum muda. Pada tahun 1925 lahir Perhimpunan Indonesia (PI) yang berasal dari organisasi perhimpunan *Indische Vereeniging* bentukan mahasiswa Indonesia di Belanda.<sup>8</sup> Pada tahun 1926 terbentuklah PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) yang memiliki latar belakang politik untuk merekatkan berbagai wadah kebangsaan yang tengah berkembang pada masa tersebut.<sup>9</sup> Baru kemudian pada tahun 1930-an bermunculan dengan pesat sejumlah kelompok studi seperti St. Belarmius sebagai wadah mahasiswa Katolik, CSV (*Cristelijke Studenten Vereeniging*) bagi mahasiswa Kristen, serta SIS (*Studenten Islam Studie-club*) bagi mahasiswa

<sup>7</sup> Adi Suryadi Culla, *Op.Cit.*, hlm.21.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Islam.<sup>10</sup> Semua organisasi kemahasiswaan serta kelompok-kelompok studi yang terbentuk ini bersepakat memiliki satu tujuan untuk dicapai, yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Pasca kemerdekaan, organisasi-organisasi mahasiswa berkembang dengan memiliki kecenderungan untuk berafiliasi pada partai politik tertentu. Dalam masa demokrasi parlementer yang menerapkan sistem kepartaian yang majemuk, organisasi mahasiswa ekstra kampus yang ada kebanyakan lebih bersifat *underbouw* partai-partai politik. Misalnya, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dekat dengan PNI, CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dekat dengan PKI, Gemos (Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia) dengan PSI, Germahi (Gerakan Mahasiswa Muslim Indonesia) memihak pada Perti, SEMNI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) dekat dengan PSII, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) berafiliasi dengan NU, dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) secara afiliasi dekat dengan Masyumi.<sup>11</sup>

Perkembangan kehidupan sosial politik pasca kemerdekaan menimbulkan gejolak yang pada akhirnya mengundang mahasiswa sebagai kekuatan politik dan kekuatan moral untuk tampil dalam pergerakan-pergerakan dalam menyingkapi segala fenomena yang ada. Maka kemudian lahirlah apa yang dikenal dengan pergerakan mahasiswa angkatan 1966, 1974, 1978 hingga pada akhirnya angkatan 1998. Dimana yang membedakan setiap angkatan-angkatan tersebut adalah misi, situasi serta wadah pergerakannya.

Angkatan 1966 dinilai sebagai angkatan gerakan mahasiswa yang paling bersejarah, karena perannya dalam merobohkan orde lama dan turut

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>11</sup> Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984* (Jakarta: CV.Rajawali, 1984), hlm. 43-44.

membidani lahirnya orde baru. Misi yang diemban oleh angkatan 1966 adalah untuk 'mendobrak status quo', meruntuhkan kekuasaan orde lama yang dipimpin oleh Soekarno karena telah dinilai menyimpang dari idealisme mereka. Angkatan 1974 dan 1978 kurang lebih mengemban misi yang sama, yaitu melakukan koreksi terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan orde baru, sehingga isu yang diangkat adalah seputar masalah korupsi dan kebijakan pembangunan. Hanya saja secara spesifik yang membedakan adalah, angkatan 1974 menitikberatkan pada masalah perlunya meninjau kembali kebijakan pembangunan makro yang sangat bergantung pada sistem kapitalisme internasional; sedangkan angkatan 1978 selain mengusung isu lokal seperti kelaparan di daerah, juga secara khusus menggugat masalah kepemimpinan nasional dimana mereka mewakili segenap rakyat Indonesia menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden.

Situasi yang dihadapi oleh masing-masing angkatan tersebut juga berbeda, yaitu menyangkut dukungan yang diberikan militer pada mereka. Berbeda dengan angkatan 1966 yang secara nyata didukung oleh militer pada saat menggugat sekaligus meruntuhkan kekuasaan Soekarno, sebaliknya angkatan 1978 hampir sama sekali tidak mendapatkan dukungan nyata dari militer.<sup>12</sup> Gerakan mahasiswa angkatan 1978, sebagaimana juga dialami oleh angkatan 1974, harus berkonfrontasi langsung dengan pihak militer yang berposisi sebagai pendukung keamanan.

Perbedaan lain yang dapat ditemui dari ketiga angkatan mahasiswa tersebut adalah wadah pergerakannya. Dimana dalam gerakan mahasiswa tahun

<sup>12</sup> Masmiar Mangiang, "Mahasiswa, Ilusi Tentang Sebuah Kekuasaan", dalam *Prisma*, No.12 (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 100

1966 organisasi mahasiswa ekstra universitas lebih banyak mengambil peran penting dalam setiap aksi demonstrasi yang dilakukan, berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 1974 dan 1978 yang lebih mengandalkan organisasi intra universitas. Motor perjuangan gerakan mahasiswa tahun 1966 adalah organisasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1965 atas kesepakatan sejumlah organisasi-organisasi mahasiswa pada waktu itu antara lain: HMI, PMII, GMKI, SOMAL (Sekretariat Bersama Organisasi-Organisasi Mahasiswa Lokal), Mapancas (Mahasiswa Pancasila), dan IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa).<sup>13</sup> Sedangkan pada gerakan mahasiswa tahun 1974 dan 1978, organisasi mahasiswa intra universitas yaitu DM (Dewan Mahasiswa) dan SM (Senat Mahasiswa) mengambil peran sentral.

Kesamaan yang dimiliki oleh ketiga gerakan mahasiswa angkatan 1966, 1974 dan 1978 adalah perwujudan peran mahasiswa sebagai kekuatan moral atau *moral force*. Hal ini seiring dengan peran intelektual mereka sebagai bagian dari kelas sosial di masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Selepas gerakan mahasiswa angkatan 1974 dan 1978, yang dinilai gagal karena tidak mampu membuat pemerintah mengadakan perubahan dalam sistem politiknya, tidak ada lagi gerakan besar yang dilakukan mahasiswa sepanjang beberapa tahun kedepan akibat penerapan kekuasaan otoritarian rezim orde baru. Orde baru yang trauma atas sebak terjang mahasiswa dalam upaya-upaya mereka melakukan koreksi atas jalannya pemerintahan, akhirnya menemukan cara yang efektif untuk membungkam mahasiswa melalui produk

---

<sup>13</sup> Ridwan Saidi, *Mahasiswa dan Lingkaran Politik* (Jakarta: LPMI, 1989), hlm. 75-76.

kebijakan yang dihasilkannya. Melalui Daoed Yoesoef selaku Menteri P dan K pada Kabinet Pembangunan III, maka lahirlah kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) berdasarkan SK No. 0156/U/1978.<sup>14</sup> Menyusul kemudian SK Menteri P&K RI No. 037/U/1979 mengenai pembentukan struktur keorganisasi mahasiswa yang baru yaitu BKK (Badan Kordinasi Kemahasiswaan), menggantikan DM (Dewan Mahasiswa) yang dibekukan dengan keluarnya SK Kopkamtib No. 02/Kopkam/1978.<sup>15</sup> Penerapan kebijakan NKK/BKK ini menandai lahirnya periode 'mati suri' gerakan kemahasiswaan di Indonesia.

Kebijakan NKK/BKK ini dihasilkan agar digunakan sebagai pedoman normatif bagi penataan kampus yang telah dinilai berubah fungsi menjadi arena politik praktis.<sup>16</sup> Dengan adanya konsep ini, maka mahasiswa diarahkan untuk fokus pada kegiatan-kegiatan akademik semata, dan menjauhkan diri dari aktivitas-aktivitas politik yang dirasa dapat membahayakan rezim orde baru.

Kebijakan NKK/BKK ini berhasil membawa perubahan dalam organisasi kemahasiswaan. Pada skala organisasi intra, kebebasan mahasiswa dalam mengatur diri sendiri menjadi terpasung karena menurut konsep itu keputusan akhir menjadi wewenang pimpinan fakultas/universitas.<sup>17</sup> Sedangkan pada skala organisasi ekstra, dikeluarkannya UU No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah berhasil melumpuhkan sepakterjang mereka.<sup>18</sup> Dengan

<sup>14</sup> Adi Suryadi Culla, *Loc.Cit.*, hlm. 118.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>16</sup> Kutipan Ulf Sundhaussen dalam Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1995), hlm. 164.

<sup>17</sup> Adi Suryadi Culla, *Op.Cit.* hlm. 122.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

konsep NKK/BKK itu, maka peranan yang dimainkan organisasi intra dan ekstra kampus dalam melakukan kerjasama dan transaksi komunikasi politik menjadi lumpuh.

Sebagai alternatif terhadap pembungkaman organisasi-organisasi intra dan ekstra kampus, maka mulai bermunculan kelompok-kelompok studi di awal tahun 1980-an. Disusul dengan kelahiran wadah-wadah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada pertengahan tahun 1980-an sebagai alternatif bagi wadah gerakan mahasiswa.

Ciri-ciri gerakan mahasiswa pasca NKK/BKK tahun 1980-an hingga masa awal tahun 1990-an lebih banyak berkonsentrasi pada isu-isu lokal.<sup>19</sup> Kasus-kasus lokal yang menjadi sorotan mahasiswa pada kala itu adalah korupsi, hak azasi manusia, politik lokal, lingkungan hidup, soal pertanahan, solidaritas antar-mahasiswa serta penurunan tarif listrik. Penggarapan isu-isu lokal dimaksudkan mahasiswa untuk dapat mendekatkan diri lebih lagi pada rakyat, membangkitkan kesadaran dan kepercayaan diri rakyat agar mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak individu dan sosialnya.<sup>20</sup> Dan pada saat itu juga, LSM-LSM yang tumbuh di Indonesia secara khusus tengah bersentuhan dengan masalah gender yang sehubungan dengan pembangunan.<sup>21</sup>

Pada tahun 1990 kebijakan NKK/BKK yang telah diterapkan sekian lama akhirnya dicabut, dengan dikeluarkannya SK No. 0457/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK) oleh Mendikbud Fuad Hassan. Kebijakan ini melahirkan wadah organisasi kemahasiswaan baru di

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>20</sup> Bonar Tigor Naipospos, "Mahasiswa Indonesia dalam Pangung Politik: K arah Gerakan Rakyat?", dalam *Prisma*, No.7 (Jakarta: LP3ES, 7 Juli 1996), hlm. 17-33.

<sup>21</sup> DR.Mansour Fakih, *Loc.Cit.*, hlm. 161.

dalam kampus, yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Terlepas dari pro-kontra terhadap konsep SMPT yang diciptakan oleh pemerintah, dicabutnya kebijakan NKK/BKK merupakan awal dari kebangkitan kembali mahasiswa.

Pada akhirnya gerakan mahasiswa pada masa orde baru mencapai momentumnya, seakan-akan kembali pada masa 1966, pada tahun 1998. Generasi mahasiswa 1998 dalam skala yang menyeluruh melahirkan gerakan yang mampu mendobrak kemapanan orde baru, meruntuhkan kekuasaan Soeharto, menandai lahirnya orde reformasi.

Lahirnya gerakan mahasiswa angkatan 1998 merupakan hasil dari akumulasi dari ketidakpuasan dan kekecewaan politik yang telah berkejolak dibawah permukaan selama puluhan tahun, yang menggumpal dan selanjutnya meledak.<sup>22</sup> Misi yang diemban oleh mahasiswa angkatan 1998 adalah mengadakan perubahan secara mendasar, yaitu perubahan sistem politik secara menyeluruh serta penggantian pimpinan nasional yang selama ini menjadi simbol kekuatan rezim orde baru.

Wadah perjuangan mahasiswa angkatan 1998 merupakan gabungan dari seluruh elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus meleburkan diri sebagai kekuatan rakyat.<sup>23</sup> Ditambah lagi dukungan dari LSM-LSM, berbagai macam ormas serta dari kalangan civitas akademika. Fenomena ini sesuai dengan konsep dasar para mahasiswa kala itu, untuk mewujudkan suatu gerakan yang merakyat. Sedangkan

<sup>22</sup> Adi Suryadi Culla, *Op.Cit.*, hlm. 143.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

benang merah antara gerakan mahasiswa angkatan 1974, 1978 dan 1998 adalah posisi militer terhadap mereka. Militer memperlihatkan sikap mendua terhadap mahasiswa, dimana mereka mengeluarkan statemen yang mengacu pada dukungan terhadap reformasi, tetapi disisi lain juga mengambil tindakan-tindakan represif terhadap mahasiswa. Menghadapi realitas sedemikian rupa, maka mahasiswa mengambil jarak dengan militer.

Gerakan mahasiswa 1998 yang telah berhasil merobohkan rezim otoriter orde baru dan melahirkan orde reformasi memiliki suatu persamaan dengan gerakan-gerakan mahasiswa generasi pendahulunya. Perjuangan mereka pada intinya adalah berusaha untuk mewujudkan sistem kenegaraan yang ideal, menghargai hak-hak azasi manusia, mengandung nilai-nilai demokrasi serta mampu mensejahterakan rakyatnya.

Perjuangan mahasiswa tidak berhenti sampai disini saja. Masih banyak hal yang harus direalisasikan seiring dengan proses demokratisasi yang tengah melanda Indonesia. Partisipasi mahasiswa sebagai kaum intelektual muda bukan lagi sebatas melakukan aksi demonstrasi langsung dengan turun ke jalanan, melainkan turut ambil bagian dalam usaha mengembangkan nilai-nilai demokrasi secara langsung dalam praktek sehari-harinya melalui wadah-wadah yang sesuai. Salah satu wadah yang sesuai adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus (ormek) yang memiliki akar kuat dalam sejarah pergerakan kemahasiswaan.

Kembalinya mahasiswa pada organisasi kemahasiswaannya, yaitu ormek, pasca tumbanganya orde baru turut membawa perubahan pada ruang serta arah gerak didalam tubuh organisasi tersebut. Ormek mulai mengembangkan

lebih lagi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan tuntutan dan keadaan jaman, yang selama ini 'dibatasi' atau dianggap tabu. Salah satunya adalah tuntutan untuk memperbaiki posisi kaum perempuan Indonesia yang masih tertindas, yaitu tercapainya kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk perjuangan dalam usaha mewujudkan nilai-nilai demokrasi, yaitu persamaan dan keadilan. Pada kenyataannya kaum perempuan Indonesia belum mendapat posisi yang sama dengan laki-laki, juga pada saat yang sama mengalami ketidakadilan yang telah sekian lama dilegalkan baik oleh struktur maupun oleh kultur yang dilandasi ideologi patriarki. Tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender ini merupakan salah satu bentuk perjuangan yang memerlukan partisipasi mahasiswa agar dapat segera diwujudkan.

Peran mahasiswa dalam mengembangkan wacana kesetaraan gender melalui ormek merupakan salah satu usaha dilapisan akar rumput, mengingat ormek merupakan wadah aktualisasi diri mahasiswa sebagai kaum terpelajar calon elit-elit politik. Pengembangan nilai kesetaraan gender dalam ormek setidaknya akan memiliki dua konsekuensi baik bagi ormek maupun bagi mahasiswa sendiri. Pertama, bagi ormek pengembangan kesetaraan gender berkaitan dengan fungsi ormek dalam mengakomodasi nilai-nilai yang tengah berkembang, sehubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bagi mahasiswa sendiri, sebagai penggerak ormek tersebut, respon terhadap nilai kesetaraan gender yang telah menjadi tuntutan merupakan perwujudan peran mahasiswa sebagai kekuatan moral (*moral force*).

Sehubungan dengan usaha melakukan perubahan menuju perbaikan kondisi dan posisi perempuan Indonesia ke arah yang lebih baik, maka penting untuk mengetahui bagaimana serta sejauh apa gerakan kesetaraan gender dipraktekkan dalam ormek. Mengingat ormek merupakan wadah artikulasi serta aktualisasi diri mahasiswa, serta mahasiswa sebagai kaum muda terpelajar berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang identik sebagai kekuatan moral (*moral force*), yang senantiasa merespon atas terjadinya ketidakadilan sosial dalam masyarakat.

## **I.2.Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepentingan yang melatarbelakangi dilakukannya gerakan kesetaraan gender didalam ormek?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan ormek dalam menggalang idiologi tersebut?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam usaha melakukan gerakan kesetaraan gender dalam ormek?

## **I.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian mengenai gerakan kesetaraan gender didalam ormek adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pemenuhan atas persyaratan yang diwajibkan dalam menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya.
2. Sebagai proses dalam mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh penulis, terutama mengenai gender yang selama ini menjadi focus perhatian penulis, selama 9 semester berada dibangku kuliah.
3. Sebagai aktualisasi atas keingintahuan pribadi penulis mengenai sepak terjang ormek sebagai wadah aktualisasi diri mahasiswa, terutama yang berhubungan dengan gerakan kesetaraan gender.
4. Untuk memberi masukan serta informasi mengenai gerakan kesetaraan gender didalam ormek, terkait dengan motif kepentingan, proses serta hambatan yang ditemui dalam gerakan tersebut.
5. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk memahami dinamika gerakan kesetaraan gender didalam ormek, mengingat banyaknya bentuk serta wadah yang digunakan dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

#### **I.4.Kerangka Teoritik**

Gerakan sosial baru (new social movement) mulai muncul pada tahun 1960-an di Amerika dan pada tahun 1970-an di Eropa, yang mengusung isu-isu berwatak humanis, kultural dan non materialistik. Berbeda dengan gerakan 'lama' yang meneriakkan anti kaipalisme, revolusi kelas dan perjuangan kelas, gerakan baru ini sama sekali tidak tertarik pada gagasan revolusi dan

penggulingan sistem pemerintahan negara secara revolusioner.<sup>24</sup> Tujuan dan nilai-nilai gerakan ini bersifat universal, yang diarahkan guna membela esensi dan melindungi kondisi kemanusiaan demi masa depan kehidupan yang lebih baik.<sup>25</sup> Ekspresi gerakan sosial baru terentang mulai dari isu anti rasisme, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, environmentalism, regionalisme dan etnisitas, kebebasan sipil sampai pada isu kebebasan personal dan perdamaian.<sup>26</sup>

Gerakan sosial baru bisa diperlakukan sebagai refleksi pemberontakan kultural individu kontemporer yang menentang meningkatnya mekanisme sistem kontrol dan pengawasan oleh negara terhadap masyarakat, di satu sisi, dan di sisi lain, secara sebanding, peningkatan realisasi dan kepercayaan diri masyarakat yang (a) ia tidak mesti menempatkan nasib kemanusiaan ditangan negara dan harus tetap waspada terhadap penyakit-penyakit dari sistem politiknya; dan (b) ia memiliki agensi atau pelaku-pelaku sejarah, yang punya kemampuan mengubah medan pergerakannya dan transformasinya.<sup>27</sup> Pengertian 'agensi' merujuk ke rasa penemuan diri dikalangan manusia *post-modern* bahwa mereka tidak hanya duduk dan mengikuti arah panah penunjuk dari sejarah evolusioner nasib mereka, mereka bias 'mengarahkan' panah penunjuk itu mengingat manusia adalah majikan dari nasibnya sendiri.<sup>28</sup>

Menurut Jean Cohen (Cohen 1985:667), gerakan sosial baru secara umum merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil, mereka membidik domain sosial masyarakat sipil ketimbang perekonomian suatu

<sup>24</sup> Rajendra Singh, "Teori-Teori Gerakan Sosial Baru", dalam *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* No.XI, (Yogyakarta:Insist Press, 2002), hlm. 16.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Negara, membangkitkan isu-isu sehubungan dengan demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif. Cohen menyatakan gerakan sosial baru membatasi diri dalam empat pengertian sebagai berikut :

1. Umumnya aktor-aktor gerakan sosial baru tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopia tak terjangkau di masa lalu.
2. Aktor-aktor berjuang untuk otonomi, pluralitas, dan keberbedaan tanpa menolak prinsip-prinsip egalitarian formal dari demokrasi, parlemen, partisipasi politik dan representasi publik pada struktur yuridis.
3. Para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu, untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran, kecuali dalam kasus ekspresi fundamentalis gerakan sosial baru.
4. Para aktornya mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar.

Tujuan gerakan sosial baru adalah untuk menata kembali relasi negara, masyarakat dan perekonomian, dan untuk menciptakan ruang publik didalam wacana demokratis ihwal otonomi dan kebebasan individual dan kolektivitas serta identitas dan orientasi mereka, bisa didiskusikan dan diperiksa selalu.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 22.

Studi gerakan dan aksi sosial adalah studi masyarakat dan dalam banyak aspek kehidupan sosial, aksi sosial dilihat sebagai aksi menentang negara dan kebijakan negara seperti menentang kebijakan nuklir, persenjataan, dan mendukung ekologi, kebebasan individu dan komunitas, warisan kultural, identitas dan gender. Gerakan sosial baru berkomitmen pada isu-isu patriarki, gender, negara, kebudayaan, bahasa dan identitas dimana esensi fokusnya bersifat plural.<sup>30</sup> Dan, akhirnya, sesuai dengan struktur pluralnya, gerakan sosial baru umumnya bersifat global, transnasional dan tidak terbagi-bagi (non-segmental).<sup>31</sup>

Aktor-aktor gerakan social baru berasal dari basisi social yang luas, tidak terbagi-bagi, melintasi kategori-kategori sosial ihwal gender, pendidikan, okupasi atau kelas.<sup>32</sup> Para pelaku gerakan sosial baru tidak tersegmentasi pada pembagian tertentu seperti proletariat, petani, kelas buruh dan sebagainya. Mereka yang terlibat dalam gerakan sosial baru bukan berdasarkan pada kepentingan kelas mereka, tetapi mereka berjuang demi kepentingan kemanusiaan. Sementara struktur gerakan social baru secara umum melintasi batas-batas nasional, para pelaku gerakan menyeberangi kotak-kotak kategori social dari kasta, kelas, suku, agama, dan teritori politik.<sup>33</sup>

Karena keuniversalan para pelaku gerakan ini, yang tersirat adalah pelaku gerakan sosial baru kebanyakan berasal dari 'kelas menengah baru'. Menurut Claus Offe (Offe, 1985:831) dalam bahasa politik, mereka tidak masuk dalam kategori 'kanan' atau 'kiri', 'liberal' atau 'konservatif', tidak juga

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>33</sup> *Ibid.*

diidentifikasi berdasarkan kelas, gender, suku, umur, lokalitas dan lain sebagainya. Offe melacak aktor-aktor ini dalam kelas menengah baru, khususnya unsur-unsur kelas ini yang bekerja dalam profesi pelayanan kemanusiaan, unsur-unsur kelas menengah lama dan orang-orang yang menempati posisi penggiran seperti pelajar, ibu rumah tangga dan pensiunan.

Aktor-aktor gerakan sosial baru seperti feminis, ekolog, aktivis perdamaian, dan pengusung otonomi, memiliki pemahaman diri bahwa identitas, tujuan, dan cara-cara berasosiasi mereka secara historis adalah baru.<sup>34</sup> Menurut Cohen (Cohen, 1985:667) para partisipan gerakan sosial baru tidak memandang diri mereka dalam kerangka kelas sosio-ekonomi. Aktor-aktor gerakan sosial baru memusatkan pada politik akar-rumput dan menciptakan asosiasi-asosiasi demokratis yang horizontal dan langsung, yang berhimpun dalam federasi longgar pada tingkatan nasional.

Gerakan mahasiswa merupakan bagian khusus dari gerakan sosial yang bertujuan untuk mengusahakan suatu perubahan sosial. Untuk menganalisis gerakan sosial dan masalah perubahan sosial maka Ted Robert Gurr mengembangkan teori yang disebut Relative Deprivation (Deprivasi Relatif). Menurut Gurr tingkah laku agresif, khususnya tingkah laku agresif massa timbul sebagai akibat adanya frustrasi dalam masyarakat.<sup>35</sup> Frustrasi itu terjadi karena adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan atau kemampuannya.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>35</sup> Ted Robert Gurr dalam Drs. Aribowo, "Sejarah, Pola dan Format Gerakan Mahasiswa (Studi Tentang Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Yogyakarta)", (Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1997), hlm. 10.

Perasaan deprivasi, dari ketidakpuasaan atas situasi seseorang, bergantung pada apakah yang ingin dimiliki seseorang atas sesuatu hal. Deprivasi Relatif (DR) bagi seseorang tidak hanya mengenai tujuan yang diberikan pada seseorang, tetapi juga merasa bahwa dia mempunyai hak untuk mencapai tujuan tersebut, dia merasa pantas memperolehnya, paling tidak dibawah kondisi tertentu.<sup>36</sup>

Menurut Denton E Morrison (Morrison, 1973) gerakan sosial muncul dan tumbuh karena pengelompokan dari orang-orang yang sedang mengalami DR. Dan gerakan sosial biasanya bukan muncul dari orang hina dina, yang tidak berdaya sama sekali, melainkan sering kali tumbuh dari kelompok sosial yang relative berpengalaman yang menginginkan perubahan secara kontinyu.

Mahasiswa merupakan kelompok berpengalaman yang dalam melakukan gerakannya menginginkan suatu perubahan yang kontinyu. Phillip G Albatch menyimpulkan adanya 2 fungsi gerakan mahasiswa dalam proses perubahan, yaitu untuk menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik.<sup>37</sup> Untuk itu mahasiswa memainkan peranan yang inheren dengan fenomena perubahan sosial, ekonomi dan politik.

Sementara analisa dari Neil Smelser membantu untuk mengetahui tentang gerakan-gerakan social secara bertahap :

#### 1. *Structural Conductiveness*

Disebutkan bahwa gerakan itu selalu bermula dari system sosial yang berlaku dalam masyarakat. Di mana pola system itu akan

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.5.

mempengaruhi pola atau warna gerakan. Struktur sosial yang terdeferensiasi dan dengan stratifikasi yang kuat mempengaruhi terjadinya gerakan social, seperti kekuatan religi dan karakteristik kultural.

## 2. *Structural Strain*

Suasana ketegangan structural dalam masyarakat sebagai akibat dari berbagai macam perubahan dan fluktuasi sosio-politik-ekonomi, seperti, perbedaan peranan dan status sosial, ambiguitas, deprivasi, konflik atau pertentangan dapat menjadi factor pendorong bagi gerakan.

## 3. *Spread of Generalized Belief*

Biasanya gerakan social dapat didahului oleh penyebaran isu sebagai sumber-sumber ketegangan, seperti ketimpangan dalam masyarakat dan biasanya individu yang merasa tertekan dan terisolasi akan cepat merespon yang pada akhirnya nanti mampu menambah keterpercayaan mereka pada perlunya gerakan.

## 4. *Precipitating Factors*

Semua gerakan akan muncul ke permukaan ketika sudah ada factor-faktor penentunya. Factor penentu itu akan muncul secara tiba-tiba yang kemudian memberikan perkembangan yang konkret bagi *spread of generalized belief*, seperti, pembunuhan, kekerasan, ledakan dan sebagainya.

## 5. *Mobilization of Participants for Action*

Pada saat inilah akan memungkinkan munculnya pemimpin gerakan yang akan mengarahkan gerakan. Kepemimpinan merupakan factor yang krusial yang penting dalam suatu gerakan. Gerakan social memerlukan tipe pemimpin yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan dalam gerakan.

#### 6. *The Operation of Social Control*

Tahapan ini merupakan factor yang akan menguji fungsi gerakan, dimana gerakan itu sangat bergantung pada system politik atau system masyarakat secara keseluruhan. Kontrol sosial terdiri dari faktor kontra yang mencegah, menghalangi atau menangkis faktor-faktor yang menimbulkan gerakan sosial. Selain itu kontrol sosial muncul pertama kali pada saat aksi represif mulai diberlakukan atau pada waktu munculnya pembaruan lebih dahulu atas gerakan sosial yang mulai nampak. Biasanya tindakan suatu rezim tergantung pada, antara lain, sifat gerakan itu sendiri; persepsi pemerintah terhadap sifat gerakan dan sifat kelompok sosial yang merupakan kunci terhadap gerakan sosial.

Menurut Mark N. Hagopian bahwa periode (tahap) 1 sampai 4 gerakan sosial Neil Smelser, dinamakan masa inkubasi. Tahap ke-5 adalah periode aksi dan tahap ke-6 merupakan periode adaptasi atau institusionalisasi. Namun pada prinsipnya gerakan yang sukses cenderung terlembaga. Karena sulit

Berdasarkan analisa dari Smelser tersebut diatas, terdapat beberapa aspek yang akan selalu nampak dalam setiap gerakan, tidak terkecuali dalam gerakan mahasiswa, yaitu :

1. Keadaan struktur sosial yang memberikan perspektif awal tiap terjadinya suatu gerakan sosial, politik, ekonomi.
2. Kedua, dalam gerakan tersebut selalu mengandung aspek struktural strain yang diakibatkan oleh adanya fluktuasi sosial, politik, ekonomi.

Sebagai bagian dari gerakan sosial baru, gelombang pemikiran feminisme terbagi atas tiga periode yang terus berkesinambungan dan terarah. Pada gelombang pertama menekankan pada materialisme, tentang perempuan secara individual, kelompok social, dan kepentingan politiknya serta kebutuhan pribadi.<sup>38</sup> Hal ini merupakan campuran dari tuntutan akan persamaan hak wanita dalam hukum dan pekerjaan dengan feminisme kesejahteraan yang tidak mempersoalkan keutamaan peran wanita dalam rumah tangga melainkan memusatkan perhatian pada kebutuhan khusus mereka sebagai ibu dan istri.

Pada gelombang kedua, solidaritas moral diciptakan oleh nilai feminis dan identitas yang berdasarkan pada perbedaan yang menyertakan material perempuan, fisik dan kekuasaan afiliasi.<sup>39</sup> Selain itu ditandai pula oleh kehadiran liberation movement yang kemudian dikenal dengan feminis radikal yang menuntut 2 hal yaitu : tuntutan akan demokrasi yang bersifat partisipatoris dan 'the personal is political', dan yang kedua yang melihat inti permasalahan terletak pada konflik yang mendasar antara wanita dan pria. Sedangkan

<sup>38</sup> Maggie Humm, *First Wave Feminism : Feminism a Reader*, (Herdford Shire:Harvester Wheatsheaf, 1992), hlm. 5.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

gelombang ketiga memperhatikan perjuangan perempuan melalui gerakan yang lebih jelas dan beragam seperti radikal, sosialis, liberal atau reformis, cultural dan post-modernis.<sup>40</sup>

Pemikiran Feminisme Liberal, yang dipengaruhi oleh paradigma fungsionalis, muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai moral serta kebebasan individu, namun pada saat yang sama dianggap mendiskriminasi kaum perempuan.<sup>41</sup> Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan dunia publik. Tujuan umum dari feminisme liberal adalah untuk menciptakan “masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang”, dengan harapan bahwa hanya didalam masyarakat yang seperti itu perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan diri.<sup>42</sup> Menurut Betty Friedan, bersama dengan laki-laki, perempuan mungkin dapat mengembangkan jenis nilai-nilai sosial, gaya kepemimpinan, dan struktur institusional yang akan memungkinkan kedua gender untuk mencapai pemenuhannya, baik didunia publik maupun privat.

Dalam sejarahnya, gerakan feminisme liberal sebagian besar bergerak dibidang legislasi untuk memperjuangkan hak-hak politik perempuan, misalnya hak pilih politik. Sejalan dengan keyakinan para feminis liberal klasik bahwa setelah hukum dan kebijakan yang diskriminatif dihilangkan, sejak itu

<sup>40</sup> SJ Wilson, *Women, Families and Work* (New York:Mcgraw-Will Ryeson, 1991), hlm.8.

<sup>41</sup> DR.Mansour Fakh, *Loc.Cit.*, hlm. 81.

<sup>42</sup> Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought* (Yogyakarta:Jalasutra, 1998), hlm. 18.

secara formal perempuan dimampukan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki.<sup>43</sup>

Apabila aliran feminisme liberal lebih bersifat reformis, maka pada saat yang bersamaan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an berkembang pula aliran *Feminisme Radikal* yang memandang diri mereka sebagai revolusioner. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa para feminis liberal sebagai kelompok hak-hak perempuan, sedangkan para feminis radikal sebagai kelompok pembebasan perempuan.

Pemikiran feminisme radikal meyakini bahwa sistem seks atau gender adalah penyebab fundamental dari opresi terhadap perempuan.<sup>44</sup> Menurut Kate Millet dalam bukunya *Sexual Politics* (1970), berpendapat bahwa seks adalah politis, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari semua hubungan kekuasaan. Karena kendali laki-laki didunia publik dan privat menimbulkan patriarki, penguasaan oleh laki-laki harus dihapuskan jika perempuan ingin mendapat kekuasaan.

Bagi gerakan feminisme radikal, revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk merubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka sendiri terhadap kaum laki-laki. Dengan kata lain, bagi gerakan feminisme radikal, revolusi dan perlawanan atas penindasan perempuan bisa dalam bentuk yang sangat personal : urusan subyektif individu perempuan.<sup>45</sup>

Aliran feminisme ketiga yang juga berkembang pesat adalah aliran *Feminisme Marxis dan Sosialis*. Meskipun memiliki penekanan yang berbeda mengenai penyebab ketertindasan perempuan, tetapi dua kelompok

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>45</sup> DR.Mansour Fakih, *Log.Cit.*, hlm. 86.

pemikiran ini memiliki substansi yang kurang lebih sama. Para feminis marxis mengidentifikasi klasisme sebagai penyebab utama opresi terhadap perempuan, sedangkan feminis sosialis meyakini akar ketertindasan perempuan adalah hasil dari suatu keterkaitan yang sangat rumit antara kapitalisme dan patriarki.<sup>46</sup> Kesepahaman antara feminis marxis dan sosialis adalah bahwa mereka percaya bahwa opresi terhadap perempuan bukanlah hasil tindakan sengaja satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial dan ekonomi tempat individu itu hidup.<sup>47</sup>

Tujuan akhir dari feminisme marxis adalah untuk menghancurkan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Pemikiran marxisme berjanji untuk merekonstruksi sifat manusia dengan cara yang menghindari dikotomi berbahaya yang menjadikan sebagian kita sebagai budak dari yang lain, dan sebagian yang lain majikan dari yang lain.<sup>48</sup> Maka untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan, jalan yang ditawarkan oleh marxisme adalah melalui perjuangan kelas.

Tujuan akhir feminisme sosialis adalah penghapusan kapitalisme dan penghancuran patriarki. Kapitalisme yang bergandengan tangan dengan patriarki menyebabkan pemisahan tempat kerja dan rumah, dengan mengirim perempuan untuk bekerja dirumah sementara laki-laki ke tempat kerja. Maka untuk merubah hubungan material dan ekonomi manusia perlu juga dirubah idiologi yang mendasari hubungan tersebut.

Salah satu wadah yang digunakan oleh gerakan dalam upaya mewujudkan kepentingannya adalah melalui kelompok kepentingan. Kelompok

<sup>46</sup> Rosemarie Putnam Tong, *Op. Cit.*, hlm. 139.

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

kepentingan dipahami sebagai sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.<sup>49</sup> Menurut Jane J Mansbridge, kelompok kepentingan memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu untuk menekan sekaligus mempengaruhi.<sup>50</sup> Dan kelompok kepentingan juga memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya.

Sedangkan Graham Wilson (1981 : 4) lebih melihat kelompok kepentingan dari segi perwakilannya, dimana kelompok kepentingan dipahami sebagai organisasi yang bertujuan, atau menyatakan diri untuk mewakili orang-perorangan atau organisasi-organisasi yang saling berbagi satu atau lebih tujuan atau ide yang sama.

Dalam upaya mengartikulasikan kepentingannya kelompok kepentingan akan selalu berupaya untuk mencari bentuk-bentuk saluran yang efektif dan dapat bersifat khusus sehingga mampu mencapai hasil artikulasi yang maksimal bagi kelompok kepentingan tersebut sebagai tujuan dari tuntutannya. Menurut Almond ada empat saluran penting bagi suatu kelompok kepentingan untuk mengajukan kepentingannya<sup>51</sup>, yaitu :

1. melalui demonstrasi, huru-hara yang bersifat fisik dan kekerasan,
2. melalui hubungan pribadi seperti sesama alumni, kawan lama, satu daerah, dan sebagainya;

<sup>49</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Gramedia, 2002), hal. 109.

<sup>50</sup> Jane J Mansbridge, "A Deliberative Theory of Interest Representation" dalam *The Politics of Interest : Interest Groups Transformed*, Mark P.Petracca – ed - , (Colorado:Westview Press, 1992), hal. 32.

<sup>51</sup> Ramlan Surbakti, *Perbandingan Sistem Politik*, (Surabaya:Meephiso Grafika, 1984), hal. 101-104.

3. melalui para elite yang mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan eksekutif ataupun para elite yang bersimpati pada mereka;
4. melalui saluran formal dan institusional seperti melalui lembaga eksekutif dan legislatif maupun media komunikasi.

Lebih lanjut Almond menjelaskan dalam bentuk klasifikasi gaya dan sifat pengajuan kepentingan menjadi empat<sup>52</sup>, yaitu : apakah bersifat manifest (bersifat terbuka dan terus terang sehingga mudah diketahui maksudnya) atau latent (terpendam, tertutup dan berbentuk perilaku atau tindakan yang dapat ditafsirkan maksudnya seperti misalnya pemogokan dan way out ); apakah bersifat spesifik (jelas atau terperinci tentang apa yang diharapkan) atau kabur (secara umum, samar tentang tuntutan yang dikemukakan, misalnya tuntutan tentang perubahan masyarakat, tidak jelas perubahan seperti apa yang dimaksudkan); apakah bersifat umum (menyangkut kepentingan umum atau kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat) atukah khusus (cerminan golongan tertentu dalam masyarakat); apakah afeksi (berwujud harapan, penyesalan, penghargaan, kemarahan, ketakutan dan apatisme) atau instrumental (bersifat tawar-menawar dimana masing-masing pihak menanggung konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan).

Kelompok kepentingan didalamnya turut menjalankan fungsi sosialisasi politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.<sup>53</sup> Dilihat dari

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 105.

<sup>53</sup> Ramlan Surbakti, *Op.Cit.*, hal. 117.

segi cara penyampaian pesan, sosialisasi politik dibedakan menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan.<sup>54</sup> Hal ini biasanya berupa kegiatan-kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi serta keikutsertaan dalam berbagai forum. Sedangkan yang dimaksud dengan indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Hal ini diwujudkan dalam berbagai forum pengarahan yang dipenuhi dengan paksaan psikologis serta latihan yang penuh disiplin.

## **I.5.Konseptualisasi**

### *1.5.1.Dinamika*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, dinamika sosial diartikan sebagai perubahan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.<sup>55</sup>

### *1.5.2.Gerakan Sosial*

Gerakan sosial adalah gerakan yang otonomi (autonomous) dan penuh dengan kesadaran pribadi dari sekelompok orang yang dipersatukan oleh dukungan gagasan ideal ketimbang pengejaran kepentingan material.<sup>56</sup> Merujuk

<sup>54</sup> Ramlan Surbakti, *Ibid.*

<sup>55</sup> Drs.Peter Salim dan Yenny Salim,*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 355.

<sup>56</sup> Diambil dari Encyclopedia of Marxist, dalam website <http://www.Marxist.org>.

pada pengertian tersebut, pada dasarnya gerakan sosial senantiasa berkaitan dengan perubahan menuju suatu arah yang dianggap ideal oleh para penggerakannya, dengan asumsi bahwa keadaan yang ada sekarang masih belum sesuai.

### *1.5.3. Gerakan Mahasiswa*

Bonar Tigor Naipospos mencoba mendefinisikan gerakan mahasiswa (student movement) sebagai gerakan hasil dialektika dinamis antara kesadaran subyektif dengan obyektif, yang representasinya adalah dinamika struktur ekonomi, politik, negara.<sup>57</sup>

Selama ini mahasiswa yang terjun kedalam dunia politik atau melakukan manuver-manuver tertentu yang bersinggungan dengan aspek-aspek politik tidak menggunakan identitas mahasiswa sebagai kekuatan politik tersendiri, tetapi berafiliasi atau condong kepada sebuah kekuatan politik berdasarkan paham atau cita-cita tertentu.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwasanya berbeda dengan kelompok sosial lainnya, kesadaran sosial mahasiswa adalah ditentukan oleh gagasan dan bukan karena keberadaannya. Pemikiran serta kritisismenya muncul bukan karena benturan dengan persoalan masyarakat sehari-hari, tetapi lebih dipengaruhi oleh pemikiran politik dan perkembangan teori-teori pembangunan yang menjadi wacana kebijakan pembangunan yang ditempuh selama itu.

---

<sup>57</sup> Bonar Tigor Naipospos, *Loc.Cit.*, hlm. 17.

#### 1.5.4. Kesetaraan Gender

Gender dipahami sebagai konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.<sup>58</sup> Perbedaan peran-peran ini kemudian melahirkan ketimpangan serta ketidakadilan yang menimpa gender perempuan. Bertolak dari kenyataan ini maka muncullah apa yang dikenal dengan perjuangan menuju kesetaraan gender.

Dalam Inpres No.9 tahun 2000, kesetaraan gender disebut sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.<sup>59</sup>

#### 1.5.5. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek)

Yang dimaksud dengan ormek adalah organisasi kemahasiswaan yang lingkungan kegiatannya berada diluar kampus, memiliki struktur kepengurusan dan AD/ART.<sup>60</sup>

Keberadaan ormek tidak dikenal dalam UU No.30/1990 dan Keputusan Mendikbud No.0457/U/1991 tentang organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, akan tetapi secara nyata organisasi ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kampus.

<sup>58</sup> Tapi Omas Ithromi, "Resistensi dan Dukungan terhadap Keadilan dan Kesetaraan Gender", dalam buku *Konvensi Wanita di Indonesia -ed 1-*, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima (ed) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 169.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>60</sup> M.Yafis Sulaiman, *Skripsi Mahasiswa dan Politik Orde Baru (Studi Tentang Fluktuasi Gerakan Mahasiswa di Surabaya Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Tahun 1990-1998)* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), hlm.99.

Terdapat 2 gejala yang dapat dicermati dari ormek, yaitu :<sup>61</sup>

1. Ormek memiliki sifat kedewasaan sehingga lebih berhati-hati dalam bergerak.
2. Ormek tergerak untuk terjun melakukan advokasi disatu sisi, namun disisi lain mereka punya kekhawatiran terhadap resiko yang bakal dialami oleh organisasinya.

Yang membedakan ormek dari kelompok-kelompok bentukan mahasiswa yang biasa terwujud seperti komite, aksi, front, apel, ikatan dan sebagainya adalah ormek lebih berorientasi kedepan serta memiliki tujuan jangka panjang.

## **I.6. Definisi Operasional**

### ***1.6.1. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek)***

Yang dimaksud dengan ormek adalah organisasi kemahasiswaan yang lingkungan kegiatannya berada diluar kampus, memiliki struktur kpengurusan dan AD/ART.

### ***1.6.2. Idiologi***

Dalam pengertian sebagai kelompok, idiologi dipahami sebagai kepercayaan dan nilai yang menjadi milik bersama anggota-anggota dalam kelompok.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

### *1.6.3. Kesetaraan Gender*

Dalam Inpres No.9 tahun 2000, kesetaraan gender disebut sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.<sup>62</sup>

## **1.7. Metode Penelitian**

### *1.7.1. Jenis Penelitian*

Penelitian mengenai Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender dalam Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>63</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.<sup>64</sup>

### *1.7.2. Waktu dan Tempat Penelitian*

Penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir ( skripsi ) ini dilaksanakan pada bulan April – Mei 2007, bertempat dikota Surabaya.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>63</sup> Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

### *1.7.3. Subyek Penelitian*

Penelitian mengenai Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender di Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus ini memfokuskan diri pada dua Ormek yaitu HMI dan LMND. Terlepas dari adanya 5 ormek besar yang berkembang di Surabaya, yaitu : HMI, LMND, GMNI, PMII dan KAMMI, penulis hanya memilih 2 ormek tersebut diatas dengan beberapa pertimbangan akademik.

HMI merupakan ormek berlatar belakang agama (Islam) tertua di Indonesia yang memiliki jaringan kuat dan mengakar. HMI juga memiliki badan internal bagian perempuan yang telah berdiri sejak tahun 60-an. Oleh karenanya akan sangat menarik untuk untuk diteliti bagaimanakah gerakan kesetaraan gender terjadi dan berjalan didalam suatu ormek 'tua' yang bernafaskan Islam. Hal ini mengingat bahwa penafsiran terhadap religi juga merupakan salah satu aspek yang menyumbangkan pembenaran-pembenaran bagi penindasan terhadap perempuan. Jadi akan menjadi sangat menarik untuk meneliti gerakan kesetaraan gender dalam ormek yang Islami.

Selain itu, HMI memiliki seksi serta organ internal yang beragam dan mampu mencakup beragam isu sosial politik yang ada. Hal ini menunjukkan secara organisatoris HMI sebagai ormek yang komprehensif.

Sedangkan LMND dapat dikatakan sebagai ormek paling muda yang lahir pasca gerakan mahasiswa 1998. Sebagai ormek baru ternyata kehadirannya mendapat tempat dihati mahasiswa. Dengan bentuk organisasi yang berbeda dengan ormek pada umumnya, yaitu sebagai organisasi payung dan bukan organisasi massa, dan memiliki azas yang berbeda, bukan keagamaan ataupun nasionalis, LMND menjadi menarik untuk diteliti.

Yang lebih penting lagi, LMND merupakan ormek yang cukup fokus pada isu mengenai buruh. Hal ini belum pernah ditemui sebelumnya pada ormek-ormek yang sudah ada. Oleh karena nya LMND menjadi menarik untuk diteliti, karena selain melakukan gerakan kesetaraan gender yang ditujukan kedalam, juga melakukan gerakan kesetaraan gender yang difokuskan pada buruh perempuan.

Selain argumen-argumen tersebut diatas, terdapat beberapa alasan lain mengapa peneliti hanya memilih HMI dan LMND sebagai subyek penelitian. Pertama, dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ormek yang selain HMI dan LMND kurang mengakomodasi wacana kesetaraan gender. Sehingga tidak ditemui adanya gerakan yang nyata dan jelas. Kedua, penulis memiliki akses yang mudah untuk masuk dan menggali informasi di HMI dan LMND. Sedangkan untuk melakukan penelitian di ormek GMNI, PMII dan KAMMI penulis mengalami kesulitan, karena tidak memiliki akses informasi untuk masuk kedalam ormek-ormek tersebut.

#### *1.7.4. Sumber Informasi*

Dalam mengadakan penelitian ini, sumber informasi telah ditentukan terlebih dahulu melalui pertimbangan yang matang, agar data yang diperoleh valid dan berguna secara maksimal.

Sumber informasi bagi penulis adalah aktivis-aktivis ormek yang berkompentensi serta menguasai seluk-beluk kegiatan dan aktivitas dalam ormeknya. Informan yang dipilih adalah ketua cabang dari ormek yang bersangkutan, dan/atau pihak yang bertanggung jawab dalam menangani

divisi/seksi mengenai gender didalam ormek tersebut. Adapun data mengenai informan-informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Irina Dian Pitaloka, 22 tahun, Ketua Kohati Cabang Surabaya terpilih periode 2007 – 2008.
2. Juwita Hayyuning Prastiwi, 21 tahun, Kabid P3A HMI Fisip-Sastra Unair cabang Surabaya 2006-2007.
3. Isnaini, 23 tahun, Bendahara HMI Fisip-Sastra Unair cabang Surabaya 2006-2007.
4. Arif Fachrudin Achmad (Rudi), 22 tahun, ketua SRMK Surabaya.
5. Nur Fitriana (Vivi), 20 tahun, Ketua (PJS) LMND Surabaya.
6. Elisa Zakiyah, 24 tahun, aktivis LMND.

#### *1.7.5. Unit Analisis*

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kelompok. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam setiap gerakan peranan kelompok sangat menentukan arah dan sifat gerakan. Selain itu dalam praktiknya yang paling penting adalah bahwasanya setiap gerakan memiliki kecenderungan untuk dilakukan oleh kelompok dan bukan oleh perorangan.

#### *1.7.6. Teknik Pengumpulan Data*

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>65</sup> Pengumpulan data adalah langkah

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

yang sangat penting dalam metode penelitian ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.

Mengingat pentingnya teknik pengumpulan data ini dalam penelitian, maka untuk memperoleh data yang akurat, dapat dipakai tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu : teknik wawancara, teknik observasi serta studi kepustakaan.

Teknik wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara peneliti dengan informan sebagai nara sumber yang bertujuan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Wawancara yang dilakukan penulis menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan untuk mengarahkan penulis agar dapat mendapatkan data yang diperlukan. Antara lain data yang diperlukan oleh penulis adalah segala macam keterangan serta bukti yang berhubungan dengan : (1)kepentingan yang melatarbelakangi dilakukannya gerakan kesetaraan gender di ormek, (2)strategi yang dilakukan ormek dalam usaha menggalang ideologi kesetaraan gender, serta (3)hambatan yang ditemui ormek dalam usaha menggalang ideologi kesetaraan gender tersebut.

Wawancara dilakukan dengan suasana santai dan penuh rasa kekeluargaan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi proses menggali informasi dari informan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun proses wawancara dilakukan di komisariat, di kampus serta di café.

Sedangkan teknik observasi merupakan cara mengumpulkan informasi dari bahan yang berupa penampakan keadaan, suasana atau perilaku dari kenyataan yang mungkin ditemui di lapangan. Kemungkinan menggunakan teknik observasi ini didasarkan oleh alasan-alasan, bahwa :

- Observasi merupakan alat yang langsung untuk menyelidiki bersama-sama gejala, sebab banyak sekali aspek tingkah laku manusia yang hanya dapat diselidiki melalui cara observasi langsung.
- Observasi tidak terlalu membebani subyek yang diteliti, sebab observasi misalnya masih bisa berlangsung meski subyek yang diteliti melakukan kegiatan lainnya.
- Sangat memungkinkan melakukan pencatatan serempak dengan terjadinya suatu gejala.
- Tidak tergantung pada *self report*.
- Banyak kejadian yang sebenarnya penting dalam penelitian (kaitannya dengan suatu masalah yang tidak terungkap bila hanya mengandalkan wawancara saja, sebab kemungkinan suatu kejadian menurut sumber sudah biasa padahal hal tersebut sangat penting/dibutuhkan dalam penelitian).

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, didapati data-data kasat mata yang berguna sebagai data pendukung bagi penulis. Antara lain perilaku-perilaku yang dilakukan oleh informan, serta situasi dan perilaku dari anggota-anggota ornek yang bersangkutan pada saat dilakukannya wawancara dengan informan. Salah satunya adalah bagaimana anggota LMND perempuan turut mengikuti rapat organisasi sampai larut tengah malam bersama-sama anggota laki-laki lainnya tanpa dibeda-bedakan. Ataupun bagaimana anggota

HMI laki-laki (disebut HMI wan, *pen*) turut menyapu membersihkan ruangan komisariat.

Studi kepustakaan diperoleh melalui literatur yang dianggap relevan untuk penyusunan laporan penelitian ini. Studi pustaka ini juga untuk melengkapi teknik koleksi data di atas (data primer), serta nantinya berguna untuk mempertajam analisis. Antara lain berupa buku mengenai data-data yang berkaitan dengan kota Surabaya sebagai tempat penelitian. Ataupun data yang diperoleh penulis dari internet.

#### *1.7.7. Teknik Analisis Data*

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini maka teknik analisis data yang digunakan adalah *teknik analisa data deskriptif kualitatif*. Data yang diperoleh penulis diinterpretasikan terlebih dahulu sehingga menghasilkan interpretasi data. Kemudian data tersebut disajikan secara naratif untuk dapat dipahami.

Kemudian interpretasi data tersebut diinterpretasikan lebih lanjut mengenai teori yang relevan. Adapun teori yang digunakan oleh penulis adalah teori gerakan sosial baru untuk menjelaskan mengenai gerakan kesetaraan gender, teori deprivasi relatif untuk menjelaskan gerakan mahasiswa, teori feminisme untuk menjelaskan latar belakang ideologi yang dianut oleh ormek dalam menjalankan gerakan kesetaraan gender, teori sosialisasi politik serta teori kelompok kepentingan.

Kemudian hasil interpretasi data dan teoritik tadi digunakan penulis untuk membangun suatu kesimpulan yang komprehensif.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN**

#### **II.1. KOTA SURABAYA.**

##### **II.1.1 Deskripsi Umum Kota Surabaya**

Surabaya secara resmi berdiri pada tahun 1293, saat terjadi peristiwa yang kemenangan Raden Wijaya, raja pertama Mojopahit, dalam pertempuran melawan pasukan Cina. Sejak saat itu Surabaya berperan sebagai kota pelabuhan yang sangat penting.

Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur yang terlatak pada 07° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' - 112° 54' Bujur Timur. Adapun keadaan topografi Surabaya adalah sebagai berikut :

Batas Wilayah	:	
Sebelah Utara	:	Selat Madura
Sebelah Timur	:	Selat Madura
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Barat	:	Kabupaten Gresik

Luas wilayah Surabaya dibagi menjadi lima wilayah, yaitu : Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat. Dari pembagian lima wilayah tersebut terdiri dari 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Wilayah tersebut terdiri dari 80% dataran rendah dengan

ketinggian 3-6 m dan kemiringan 3 %, serta 20% perbukitan dengan gelombang rendah dengan ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15%.

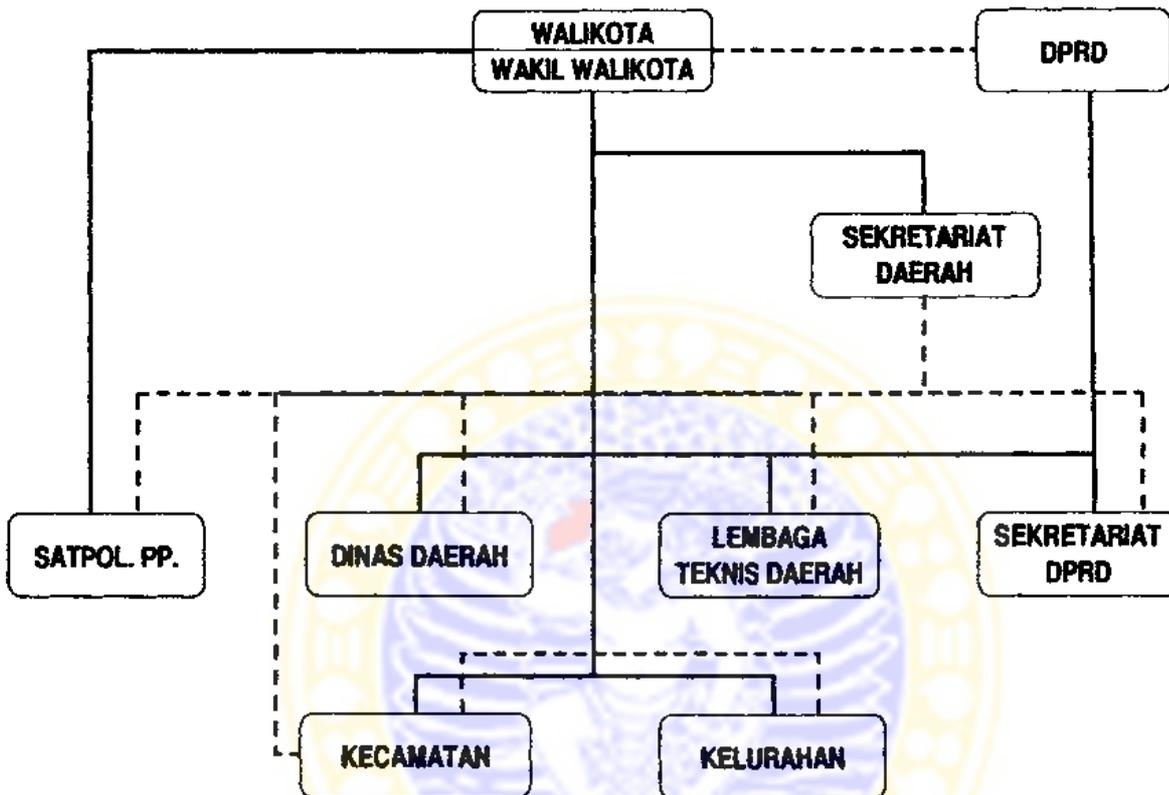
Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara membaaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya.

Di pusat kota banyak dijumpai pusat perdagangan dan perkantoran. Di Surabaya banyak dijumpai toko kelas atas, yang menjual barang berkelas dan berkualitas; walaupun tentu saja di sini banyak toko kecil yang menjual barang murah yang terjangkau masyarakat. Banyaknya pedagang keliling dan pedagang kaki lima merupakan salah satu ciri khas kota Surabaya.

Hasil Pilkada 2005 di kota Surabaya menetapkan Drs.Bambang Dwi Hartono, MPd sebagai walikota dan Drs.H Arif Afandi sebagai wakil walikota. Sinergi yang dihasilkan oleh pasangan pemimpin ini antara lain menghasilkan visi untuk Surabaya 2006-2010 yaitu 'Surabaya Cerdas dan Peduli (Surabaya Smart and Care)'. Untuk mewujudkan hal ini telah dicanangkan pula 8 pokok misi yang diemban. Misi ini meliputi seluruh bidang kehidupan yang ada, yaitu sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pemerintahan kota Surabaya dapat dilihat dari bagan berikut ini :

## STRUKTUR KOTA SURABAYA



Adapun misi kota Surabaya tahun 2006 – 2010 dalam bidang pemerintahan dan birokrasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, berkompeten, efisien dan professional. Adapun tujuan yang akan diwujudkan dari misi ke-1 ini, adalah :

- Terwujudnya kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional;

- Terwujudnya pelayanan prima serta birokrasi yang bersih dan berwibawa;
- Terwujudnya kenyamanan, ketertiban dan kepatuhan warga kota (stakeholders);
- Terwujudnya kemandirian keuangan daerah;

Sedangkan dibidang sosial budaya kemasyarakatan, yang menjadi pokok misi ke-8, adalah untuk menggali dan meningkatkan khasanah budaya lokal, kegiatan keagamaan, mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berakhlakul karimah. Adapun tujuan yang akan diwujudkan dari misi ke-8 adalah :

- Terwujudnya kelestarian budaya lokal yang menunjang kepariwisataan;
- Terwujudnya kerukunan antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama;
- Terwujudnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kedelapan misi yang telah dirumuskan tersebut diharapkan menjadi tanggung jawab bersama aparat pemerintah serta masyarakat Surabaya untuk bersama-sama mewujudkannya.

Pendidikan adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kota, termasuk tingkat kecerdasan masyarakat. Di Surabaya, pengembangan kegiatan pendidikan beserta penyediaan fasilitasnya, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh pihak swasta dan organisasi sosial kemasyarakatan. Catatan sejarah menunjukkan, pendirian

sekolah dan penyelenggaraan pendidikan di Surabaya pertama kali dilakukan pada tahun 1818.

Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1831, didirikan sekolah dasar negeri di mana untuk sekolah inipun, juga hanya terbatas untuk anak-anak orang Belanda. Sedangkan sekolah swasta, sebuah sekolah teknik yang disebut *ambachtschool*, dibuka pada tahun 1853. Usaha-usaha memajukan pendidikan khusus bagi anak-anak pribumi baru berkembang pada permulaan tahun 1900-an, dengan dibukanya MULO, HIS, HBS, dan Sekolah Kedokteran, yang kemudian dikenal dengan nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Perubahan ini terkait dengan berkumandangnya politik etis yang memaksa pihak pemerintah Belanda pada masa itu, untuk juga membuka sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi. Informasi mengenai pertumbuhan dunia pendidikan antara lain dapat dicatat dengan pendirian :

- Sekolah Dasar Negeri pada tahun 1831
- Sekolah Pelayaran pada tahun 1835
- Sekolah Dasar untuk Pribumi pada tahun 1853
- Sekolah Pertukangan Swasta pada tahun 1858
- Sekolah Kedokteran Hewan untuk Pribumi pada tahun 1860
- Sekolah Pertukangan Negeri pada tahun 1862
- Sekolah Teknik untuk Pribumi pada tahun 1909
- Sekolah Teknik Menengah pada tahun 1912
- Sekolah Kedokteran pada tahun 1923

Perkembangan dunia pendidikan yang dicatat oleh BPS hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2005 menyatakan bahwa jumlah lembaga pendidikan di Surabaya adalah sebagai berikut : 25 Universitas, 4 Institut, 31 Sekolah Tinggi, 13 Akademi dan 3 Politeknik.

Dari keadaan dunia pendidikan yang berkembang sedemikian rupa tersebut, akhirnya menumbuh kembangkan organisasi-organisasi mahasiswa didalam dan luar kampus. Organisasi intra kampus dapat dijumpai beragam bentuk dan jumlahnya, yang disesuaikan dengan bidang dan minat pengembangan mahasiswa.

Sedangkan organisasi mahasiswa diluar kampus, biasa dikenal dengan ormek, merupakan saluran yang mampu mengakomodasi kepentingan serta potensi mahasiswa diluar organisasi-organisasi yang ada dikampus. Adapun ormek yang berkembang dan berpengaruh di Surabaya ada 5 yaitu : HMI, LMND, GMNI, KAMMI dan PMII.

Selain organisasi yang bergerak dibidang kemahasiswaan, di Surabaya juga berkembang organisasi sosial kemasyarakatan serta LSM yang cukup fokus pada isu-isu perempuan. Setidaknya terdapat 11 organisasi kepentingan yang melakukan advokasi terhadap masalah perempuan. Advokasi yang dimaksud adalah dalam bentuk pendampingan maupun pemberdayaan yang meliputi berbagai macam isu perempuan. Salah satunya adalah pendampingan bagi perempuan, dan biasanya juga anak-anak, korban kekerasan dalam rumah tangga.

### II.1.6. Isu-Isu Gender

Isu-isu gender yang ada di kota Surabaya merambah disegala segi kehidupan, yaitu sosial kemasyarakatan, ekonomi dan politik. Masalah utamanya adalah seputar rendahnya partisipasi serta keterwakilan perempuan disegala bidang kehidupan. Hal ini disebabkan oleh struktur masyarakat yang masih bersifat patriarkis, sehingga membatasi ruang gerak perempuan.

Dibidang pendidikan, dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang bersekolah, diluar kegiatan bekerja, sangat rendah bila dibandingkan laki-laki yaitu hanya sebesar 23,07%. Sedangkan angka perempuan yang melakukan tugas domestik yaitu mengurus rumah tangga adalah sebesar 64,63%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kecenderungan, dikota metropolitan sekalipun, bahwa perempuan masih diarahkan untuk berkecimpung di ranah domestik. Penyebabnya pun beragam, dari rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mampu bersaing didunia kerja hingga seperangkat nilai dan norma yang berkembang dilingkungan tempat tinggal yang melarang seorang perempuan untuk berpartisipasi didunia publik.

Terlepas dari dunia pendidikan, didunia publik pun perempuan masih menempati posisi-posisi yang dipinggirkan, yaitu melakukan pekerjaan yang tidak dibayar. Jumlah perempuan yang melakukan pekerjaan tidak dibayar adalah sebesar 7%, sedangkan laki-laki hanya sebesar 0.85 %. Dari jumlah sebesar 7 % tersebut, jenis pekerjaan tidak dibayar yang dilakukan perempuan terutama adalah ibu rumah tangga penuh serta pekerja penuh dibidang industri rumah tangga informal.

Dibidang politik, keterwakilan perempuan dibidang politik dapat dikatakan masih sangat rendah. Berdasarkan data dari KPU Surabaya pada Pilkada Surabaya 2005, pemilih laki-laki dan perempuan jumlahnya dapat dikatakan seimbang, dan justru pemilih perempuan memiliki jumlah lebih besar. Jumlah pemilih laki-laki

sebesar 952.455 dan perempuan sebesar 981.773. Hal ini juga serupa pada pemilu 2004. Tetapi keterwakilan politik perempuan ternyata masih sangat rendah.

Jumlah anggota DPRD Surabaya periode 2004 – 2009 sebanyak 45 orang, yang terdiri dari 41 laki-laki dan 4 perempuan. Hal ini berarti keterwakilan perempuan di legislatif hanya sebesar 8,8%. Jumlah yang sangat jauh apabila dibandingkan dengan tujuan affirmative action yang mencanangkan keterwakilan perempuan sebesar 30% diparlemen. Rendahnya keterwakilan perempuan ini disebabkan beragam sebab, tetapi dapat dikatakan penyebab utamanya berujung pada tidak bekerjanya proses rekrutmen yang dijalankan oleh parpol. Selain itu juga harus diakui stereotipe bahwa perempuan tidak mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan, atau pandangan bahwa dunia politik adalah milik laki-laki, juga berperan besar dalam menghambat partisipasi serta keterwakilan perempuan.

Selain rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, jumlah perempuan yang mampu mengisi jabatan-jabatan penting di pemerintahan kota Surabaya juga terbatas. Dari 12 badan yang ada dalam struktur pemerintahan kota Surabaya, hanya 3 badan yang dikepalai oleh perempuan yaitu : dr.Lilian Anggraeny sebagai Kepala Badan RSUD Dr.Moh Soewandi, Arini Pakistyaningsih SH MM sebagai Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan dan Hj Yayuk Eko Agustin W SH MSi sebagai Kepala Badan Kepegawaian.

Begitu juga dari 15 dinas yang ada di kota Surabaya, hanya terdapat 3 dinas yang sekarang dikepalai oleh perempuan. Dinas Pajak dikepalai oleh Hj. Endang Tjaturahwati MM, Dinas Kesehatan dikepalai oleh dr.Esti Martina Rachmie serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang diketuai oleh Ir.Tri Rismaharini MT.

Sedangkan dari 10 Kepala Bagian yang ada, hanya terdapat 1 kepala bagian yang posisinya diisi oleh perempuan, yaitu Dra Wiwiek Widayati sebagai Kepala Bagian Kerjasama.

Dari gambaran tersebut diatas dapat dilihat bahwa posisi, kondisi, serta peran serta perempuan dalam dunia publik masih terbatas dan perlu untuk diperjuangkan lebih lagi.

## **II.2.ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS (ORMEK)**

Organisasi mahasiswa ekstra kampus memang tidak dikenal dalam UU No.30/1990 dan keputusan Mendikbud No.0457/U/1991 mengenai Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, tetapi dalam realitasnya ormek tumbuh dan mampu menarik perhatian mahasiswa di kampus. Sumbangsih yang diberikan cukup nyata dalam berbagai aksi dan kegiatan sebagai respon atas realitas sosial yang ada, serta mampu menciptakan sosok mahasiswa yang tidak hanya *study-oriented*.

Berikut ini akan dideskripsikan mengenai ormek yang menjadi obyek penelitian. Kedua ormek ini berskala nasional, baik yang telah berdiri sejak sebelum jaman kemerdekaan, hingga yang baru muncul sejak lahirnya orde reformasi. Kedua ormek tersebut adalah HMI dan LMND.

### **II.2.1.Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI )**

#### **II.2.1.1.Sejarah Berdirinya HMI**

HMI didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 bertepatan pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, tujuan untuk membina insan-insan akademis,

pencipta dan pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.<sup>1</sup>

Dampak dari penjajahan Belanda menyebabkan dunia pendidikan dan kemahasiswaan di Indonesia telah dicekoki oleh unsur-unsur dan sosok pendidikan Barat yang mengarah pada sekularisme dengan meninggalkan agama, di setiap aspek kehidupan manusia. Kenyataan memang menunjukkan bahwa kehidupan kemahasiswaan berada dalam krisis keseimbangan, dimana iman dan ilmu tidak ada keserasian. Demikian alam dan situasi kehidupan pendidikan di Indonesia sebelum kelahiran HMI.

Sekarang timbul persoalan, bagaimana cara mengubah kondisi yang kurang menguntungkan itu? Sehingga tercipta suasana harmonis dalam dunia pendidikan dan kemahasiswaan yang semata-mata tidak mengutamakan rasio dan ilmu pengetahuan tetapi mutlak harus diimbangi jiwa dan semangat agama.

Dari problem ini, sejak November 1945 timbullah gagasan di benak seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI), yang selama ini selalu mengikuti dan memperhatikan segala aspek dan aneka ragam kehidupan mahasiswa dan perguruan tinggi khususnya, maupun perjalanan sejarah rakyat dan bangsa Indonesia umumnya, untuk mendirikan organisasi mahasiswa sebagai alat perjuangan untuk mencapai cita-citanya. Tersebutlah nama *Lafran Pane*, ia adalah Ketua III SEMA STI bidang kemahasiswaan.

---

<sup>1</sup> Lihat Anggaran Dasar HMI, Bab III Pasal 5

Mengingat kebutuhan yang mendesak, Lafran Pane berjihad, mencari jalan keluar dari ketidakmengertian beberapa pihak tentang niat baiknya. Yaitu, bahwa organisasi ini harus didirikan. Memang sudah takdir Allah, pada saat Bapak Husaen Yahya yang memberi jam kuliah ilmu tafsir, memenuhi permintaan Lafran Pane, waktunya digunakan untuk rapat. Dan pada saat itu pula pada tanggal 5 Februari 1947 bertepatan pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, secara formal semua peserta rapat menyetujui didirikannya organisasi mahasiswa Islam, yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bertujuan:

1. Mempertahankan Negara RI dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
2. menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam.

Kemudian mengesahkan Anggaran Dasar HMI. Adapun Anggaran Rumah Tangga akan dibuat di kemudian hari.

#### **II.2.1.2. Asas dan Idiologi<sup>2</sup>**

Pancasila yang terdiri dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesungguhnya merupakan rumusan final dari suatu proses kesejarahan yang panjang, dimana faktor-faktor dinamis

---

<sup>2</sup> Diambil dari Memory Penjelasan Tentang Pancasila Sebagai Azas dan Memory Penjelasan Tentang Islam Sebagai Azas HMI, dalam Draft Materi Latihan Kader I Himpunan Mahasiswa Islam. Komisariat Fiso-Sastra Airlangga. hal. 23 dan 49

sejarah yang telah memberikan sumbangan besar dan menentukan terhadap keutuhan Pancasila.

Faktor-faktor tersebut adalah keterlibatan secara terus menerus daripada nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, social budaya, keadilan dan sebagainya dalam proses pengisian jiwa dan semangatnya. Kenyataan ini telah memberikan kekuatan yang fungsional sebagai konsensus nasional, yakni menjadikan perekat ke-Bhinekaan dan sekaligus sebagai daya ke-Ikaan.

Karena hubungan antara ke-Bhinekaan dan ke-Ikaan merupakan dua muka dari satu mata uang. Ke-Bhinekaan akan lumpuh tanpa ke-Ikaan, dan ke-Ikaan akan beku tanpa ke-Bhinekaan. Harmonisasi ke-Bhinekaan dan ke-Ikaan sesungguhnya merupakan jiwa dan semangat Pancasila. Dan Pancasila yang sedemikianlah yang pantas untuk dimasyarakatkan, diperjuangkan dan di pertahankan.

Kenyataan inilah yang telah mengilhami para pendiri negara ini pada masa-masa getir era penjajahan hingga dinyatakan pada saat Proklamasi 1945. konsekuensi logisnya bahwa ukuran-ukuran normatif kehidupan berbangsa dan bernegara bersumber kepada ke-lima nilai Pancasila yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

Diantara untaian nilai sejarah inilah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir, tepatnya 5 Februari 1947 untuk mengambil bagian tegas dalam melakukan upaya peningkatan kemaslahatan bangsa dan sekaligus sebagai upaya peningkatan dan pengembangan syi'ar Islam. Dalam hal peningkatan kemaslahatan bangsa, itu bermakna dan merupakan jaminan HMI terhadap cita-

cita bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan tekad peningkatan dan pengembangan syi'ar Islam bermakna sebagai tanggung jawab untuk menghadirkan Islam secara fungsional dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian kehadiran Islam dan umat Islam dalam kehidupan bangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah mutlak dan keberadaanya jelas, tegas dan harus dipercayai.

Orientasi kegiatan HMI bertujuan untuk terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang berafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Komunitas yang demikian merupakan jawaban betapa HMI sadar sesadar-sadarnya bahwa Islam merupakan keyakinan dan cara terbaik memberikan yang terbaik dalam tugas rahmatan lil' alamin bagi bangsa, negara dan masyarakat. Karena itulah HMI berkeyakinan bahwa Islam dan Pancasila semakin kaya, kokoh, utuh dan dinamis manakala ia merujuk pada sumber nilai dan norma Islam. Itu berarti Pancasila aman dalam pengakuan Islam.

Secara normatif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individual, akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat pemahaman/kesadaran, kepentingan, struktur dan pola aksi bersama demi tujuan-tujuan sipil.

Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan perlunya peniruan etika ketuhanan yang meliputi sikap

Rahman (pengasih), Barr (pemulia), Ghafur (pemaaf), Rahim (penyayang), dan Ikhsan (berbuat baik). Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang kaffah (tidak boleh mendua) antara aspek spiritual dan aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, dan sosial budaya).

Bagi HMI, Islam adalah agama damai, inklusif, dan transformative untuk menegakkan masyarakat di Indonesia yang demokratis. Keyakinan HMI pada azas Islam didasarkan pada pemahaman tersebut, sehingga Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para penganutnya untuk melakukan inivasi internalisasi, eksternalisasi maupun obyektifikasi. Dan yang paling fundamental adalah peningkatan umat diukur dari kualitas keimanan yang dating dari kesadaran paling dalam.

Demi tercapainya idealisme ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an maka HMI bertekad menjadikan Islam sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara profetis, inklusif dan humanis. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya kesejarahan Islam yang benar, berbakti kepada kemanusiaan dan menyerahkan semuanya pada ridla Allah SWT.

### **II.2.1.3. Organisasi dan Keanggotaan**

Untuk dapat mencapai tujuannya, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh HMI antara lain adalah :

1. Membina pribadi mahasiswa muslim untuk mencapai ahlakul karimah.
2. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
3. Mempelopori pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi kemaslahatan masa depan manusia.
4. Mengukur kehidupan umat dalam memperkenalkan Dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bersemangat, berbangsa dan bernegara.
5. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan/ Perguruan Tinggi dan Kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional, serta.
6. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan identitas dan asas keorganisasian serta berguna untuk mencapai tujuan<sup>2</sup>

Sesuai dengan pasal 5 AD HMI, keanggotaan HMI terbuka bagi mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang ditetapkan oleh pengurus cabang/pengurus besar HMI. Seangkan keanggotaan HMI terdiri dari : anggota muda, anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

Struktur organisasi HMI dari pusat hingga basis adalah sebagai berikut :

1. Pengurus Besar ( PB )
2. Badan Koordinasi ( Badko )
3. Cabang
4. Koordinator Komisariat ( Korkom )

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 6

## 5. Komisariat ( Komsat )

Sampai saat ini, HMI memiliki 17 Badko yang membawahi 165 cabang diseluruh Indonesia dengan status penuh. HMI juga memiliki 26 departemen dan 4 badan khusus HMI. Salah satu dari keempat badan khusus HMI tersebut adalah KOHATI yang merupakan alat HMI dalam melakukan gerakan kesetaraan gender.

### IL2.1.4. KOHATI ( Korp HMI-Wati)

Korp HMI-WATI (KOHATI) adalah badan khusus HMI yang bergerak dalam wacana keperempuanan HMI, di bidang kewanitaan (Psl 58 ART HMI) rumusan ini menjelaskan status. KOHATI adalah badan khusus HMI dengan spesialisasi membina anggota HMI wan untuk menjadi muslimah yang berkualitas insane cita.

KOHATI sebagai bidang internal dari HMI yang mempunyai peran strategis untuk merespon persoalan-persoalan kemasyarakatan. Salah satu problem kemasyarakatan itu adalah problem sosial bernama ketidakadilan yang banyak menimpa kaum perempuan karena ketimpangan pola relasi antara individu didalam masyarakat. Dengan demikian persoalan kewanitaan yang masalah sosial, harus mendapatkan perhatian serius dari HMI untuk merealisasikan cita-citanya ”menyujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi ALLAH SWT”.

Dalam upaya mewujudkan tantangan itu, KOHATI membentuk dasar kebijakan yang terformulasi secara integral dan komprehensif, sehingga gerakan yang dilakukan dapat mengenai sasaran yang tepat.

Arahan yang jelas dalam pergerakan perempuan itu adalah pengentalan ideologi gerakan perempuan (hegemoni ideologi) sebagai salah satu cara mewujudkan masyarakat adil, demokratis, egaliter dan beradab sebagai prototipe masyarakat madani (civil society). Konsekuensinya, kaum perempuan dituntut untuk mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang mendukung, arusnya kaum perempuan dituntut untuk harus memiliki kesinambungan dalam kemandirian intelektual serta dikategorikan dalam bersikap dengan landasan berfikir yang jelas.

Beberapa pemaparan dibawah ini merupakan sistematisasi yang dibuat oleh KOHATI dalam memainkan peran strategisnya pada pergerakan perempuan dengan tetap berpihak pada spirit nilai Islami yang terformulasi pada misi HMI.

- **TUJUAN/MISI GERAKAN** : Terbinanya perempuan muslimah berkualitas insan cita
- **TARGET** : Meningkatkan aksi dan partisipasi yang produktif dalam merespon permasalahan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya menuju terciptanya masyarakat madani.
- **SASARAN** : 1. HMI-Wati dan HMI-Wan  
2. Komunitas kaum intelektual/agamawan.  
3. Masyarakat umum

- **ISU UTAMA/MAIN ISSUE** : Main Issue (isu Utama) yang hendak ditawarkan sebagai wacana gerakan perempuan HMI (GP HMI) adalah :

1. Ke-Islaman
2. Kesejahteraan
3. Pemberdayaan/Empowerment
4. Egalitarianisme dan Demokratisme
5. Etika/moral masyarakat (public morality)

- **FUNGSI** :

Operasionalisasi dari fungsi tersebut diwujudkan dalam dua aspek pembagian kerja KOHATI yaitu :

1. Aspek Internal

Dalam hal ini KOHATI menjadi/media latihan bagi para HMI-WATI untuk pembinaan, mengembangkan dan meningkatkan potensi serta kualitasnya dalam bidang kewanitaan khususnya menyangkut kodrat kemanusiaannya umumnya melalui pendidikan, penelitian dan pelatihan serta aktivitas-aktivitas lain dalam kepengurusan HMI.

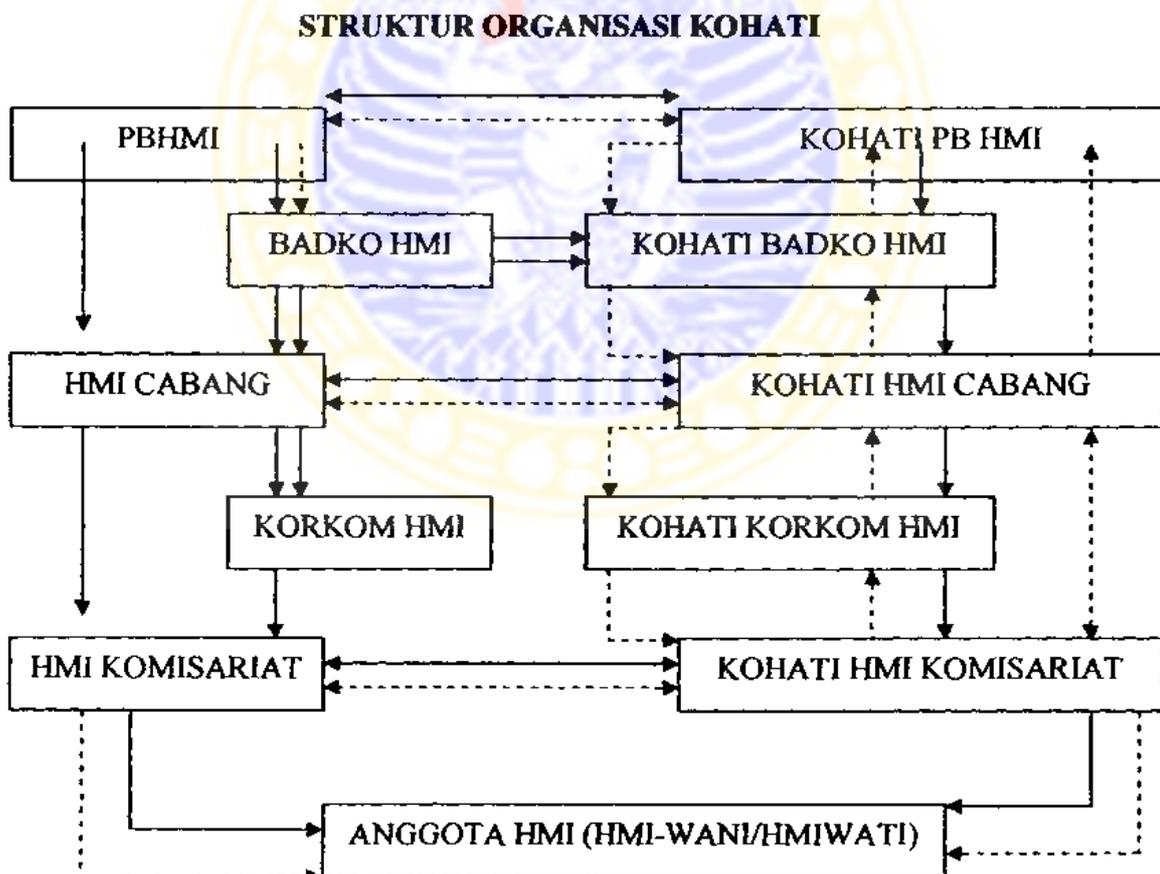
2. Aspek Eksternal

Dalam hal ini KOHATI merupakan pembawa misi HMI disetiap forum-forum kewanitaan. Kehadiran KOHATI dalam forum ini tentunya semakin memperluas keberadaan HMI disemua aspek kehidupan. Secara khusus

bagi kader HMI-WATI, keterlibatan dalam dunia eksternal merupakan pengembangan dari kualitas pengabdian masyarakat yang dimilikinya.

Dengan kata lain fungsi KOHATI adalah wadah aktualisasi dan pemacu seluruh potensi-potensi perempuan, khususnya HMI-Wati untuk mengejar kesenjangan yang ada serta mendorong HMI-Wati untuk berinteraksi secara optimal dalam setiap aktivitas HMI, beserta menjadikan ruang gerak HMI dalam masyarakat menjadi semakin luas.

Adapun struktur organisasi KOHATI dapat dilihat dari bagan tersebut dibawah ini :



Keterangan :

-----▶ : Garis koordinasi  
 —————▶ : Garis instruktif

## **II.2.2.Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ( LMND )**

### **II.2.2.1.Sejarah Berdirinya LMND**

LMND merupakan organisasi mahasiswa nasional yang berbentuk liga dan bersifat terbuka, yang didirikan pada kongres I yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 Juli 1999 di Bogor.<sup>3</sup> Perjuangan demokrasi adalah sebuah proses sosial yang penting untuk masyarakat Indonesia. Jatuhnya Soeharto di Mei 1998 jelas adalah salah satu batu loncatannya. Seperti yang kita ketahui, gerakan mahasiswa menjadi salah satu tulang punggung perjuangan melawan kediktatoran Orde Baru. Sepanjang 1998-1999 sangat terlihat begitu banyak aksi-aksi mahasiswa, dengan ribuan sampai jutaan massa rakyat mencoba menghantam satu per satu pilar kekuasaan Orde Baru. Tapi, demokrasi yang mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social yang sejati belum terwujud.

Gerakan Mahasiswa Kerakyatan memang tak luput dari kelemahan. Salah satunya adalah persoalan perjuangan yang terus berkelanjutan. Organisasi, mau tidak mau, menjadi masalah yang penting. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat diri gerakan ini. Mulai dari Rembuk Mahasiswa Nasional Indonesia atau RMNI I pada Maret 1999, RMNI II di Surabaya pada

<sup>3</sup> Lihat Anggaran Dasar LMND Pasal 2 dan Pasal 3

Mei 1999, ataupun front-front perjuangan mahasiswa secara nasional yang berdiri dan bubar sepanjang 1998-2001.

Sejak jatuhnya Soeharto, beberapa komite aksi menyadari kebutuhan sebuah organisasi perjuangan yang bergerak secara nasional, menyatukan perlawanan mahasiswa bersama rakyat dengan sistematis dan terprogram. Dimulai dengan pendirian Front Nasional untuk Reformasi Total (FNRT) pada pertengahan Mei 1998, 11 komite aksi dari 10 kota (termasuk Mahasiswa Timor Leste) mencoba mengatasi persoalan gerakan secara nasional.

Usaha FNRT tidak lama. Pada pertengahan 1998, FNRT bubar dengan sendirinya. Tapi komite-komite yang pernah bergabung didalamnya mencoba membentuk lagi sebuah organisasi nasional, Aliansi Demokratik (ALDEM) pada Agustus 1998. Mereka berhasil menerbitkan sebuah majalah "ALDEM" satu kali dan upaya menggalang aksi nasional pada tanggal 14 September dengan isu Cabut Dwifungsi ABRI. Malang, nasibnya tak jauh dengan FNRT. Putus koordinasi menjelang Sidang Istimewa 1998.

Upaya berikutnya adalah pembentukan Front Nasional untuk Demokrasi (FONDASI) pada pertengahan Februari 1998. Buntutnya RMNI II di Surabaya dalam persoalan Pemilu 1999 memaksa FONDASI untuk memunculkan dirinya dan mengadakan Kongres Mahasiswa di Bogor, 9-12 Juli 1999. Dari 20 komite aksi mahasiswa-rakyat, 19 diantaranya sepakat untuk membentuk sebuah organisasi nasional demi terwujudnya kesatuan perjuangan gerakan secara nasional. Organisasi tersebut bernama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi disingkat LMND (bisa dibaca "elemende").

### II.2.2.2. Asas dan Ideologi

Sesuai dengan pasal 5 Anggaran Dasar, tujuan LMND dinyatakan dalam ideologi organisasi yang disebut Demokrasi Kerakyatan. Demokrasi dipahami sebagai kekuasaan yang berada ditangan mayoritas. Mayoritas disini dimaknai secara harafiah, adalah jumlah terbesar yang ada didalam negara. Kelompok dengan jumlah yang paling banyak itulah yang dianggap pantas untuk menjalankan pemerintahan. Atau bisa dikatakan, pemerintahan yang ada harus mampu untuk mengakomodasi kepentingan mayoritas tersebut.

Dalam realitanya, yang menjadi mayoritas adalah masyarakat kelas menengah kebawah. LMND lebih spesifik lagi mengidentifikasi kaum mayoritas sebagai buruh, tani, dan masyarakat miskin. Oleh karena, pemerintah yang ada melalui kekuasaannya harus mampu mengakomodasi kepentingan mereka.

Demokrasi, dengan diikuti kata-kata kerakyatan adalah untuk lebih menegaskan lagi bahwa perjuangan LMND adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat mayoritas. Dan dalam demokrasi kerakyatan ini, dikembangkan pula nilai-nilai kesetaraan, keadilan serta kebebasan berbicara.

Demokrasi kerakyatan dalam pelaksanaannya memiliki pola sentralisme demokrasi. Sentralisme demokrasi ini berarti bahwa demokrasi dilakukan secara terpusat, berarti ada kesatuan gerak, untuk meminimalisir perpecahan dalam organisasi. Dalam sentralisme demokrasi ini, kerangka bekerja organisasi dilakukan secara bottom-up. Kongres serta dewan nasional merumuskan kebijakan berdasarkan masukan dari struktur organisasi yang paling

bawah didaerah. Dengan konsekuensi bahwa apabila basis yang paling bawah tidak mampu memberi laporan pada pusat, berarti harus taat pada instruksi dari atas.

Kelebihan sentralisme demokrasi yang dijalankan dalam demokrasi kerakyatan ini antara lain adalah : (1)mampu menghasilkan kekuatan yang masif, (2)meminimalisir wilayah perdebatan mengenai instruksi eksekutif nasional, (3)ada sinergi antara struktur atas dan bawah.

Sedangkan kelemahannya adalah apabila keliru memaknai sentralisme demokrasi, akan terjebak dalam situasi totaliter.

### **II.2.2.3.Organisasi dan Keanggotaan**

Keanggotaan LMND bersifat terbuka, dengan syarat sebagai berikut : (1)anggota LMND adalah organisasi mahasiswa yang berbasis massa, atau (2)individu yang bekerja pada sel-sel yang berbasis massa.<sup>4</sup> Sedangkan prinsip organisasinya adalah : garis massa, kepeloporan dan sentralisme demokratik.

Adapun pokok-pokok perjuangan LMND adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Menggerakkan dan memimpin perjuangan mahasiswa.
2. Aktif ikut serta membangun gerakan rakyat yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia.

Aktif dalam kerja-kerja solidaritas internasional untuk pembebasan rakyat tertindas.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 11

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 7

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur LMND dapat dilihat dari bagan dibawah ini :

### STRUKTUR LMND



Adapun garis kerja organisasi berdasarkan bagan diatas adalah sebagai berikut:

1. Organisasi tertinggi pembuat keputusan adalah Kongres.
2. Pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres adalah Dewan Nasinal.

3. Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional adalah Eksekutif Nasional.
4. Pelaksana keputusan Eksekutif Nasional adalah Eksekutif Wilayah, Eksekutif Kota, Eksekutif Komisariat dan sel.

Sedangkan Struktur dari Eksekutif Kota terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. DPO (Departemen Pengembangan Organisasi)
4. DPB (Departemen Pendidikan Dan Bacaan)
5. DDBU (Departemen Dana Dan Badan Usaha)
6. Koordinator JNPM (Jaringan Nasional Perempuan Mahardika)
7. Koordinator Jaker (Jaringan Kerja Kebudayaan)

Tugas Eksekutif Kota sesuai dengan pasal 6 Anggaran Rumah Tangga LMND adalah sebagai berikut:

1. Sebuah kota terdiri atas minimal 2 komisariat kampus.
2. Pengurus Struktur Eksekutif Kota dipilih melalui Konferensi Kota.
3. Eksekutif Kota bertanggung jawab terhadap Eksekutif Wilayah.
4. Eksekutif Kota wajib melaksanakan rapat pleno secara reguler sekurang-kurangnya 1x dalam sebulan.

JNPM (Jaringan Nasional Perempuan Mahardika) merupakan sebuah jaringan gerakan perjuangan gender dalam skala nasional. Melalui JNPM ini, gerakan kesetaraan gender di LMND yang telah ada sebelumnya mampu merambah tidak hanya mahasiswa, tetapi juga buruh dan kaum miskin kota.

#### **II.2.2.4. JNPM (Jaringan Nasional Perempuan Mahardika)**

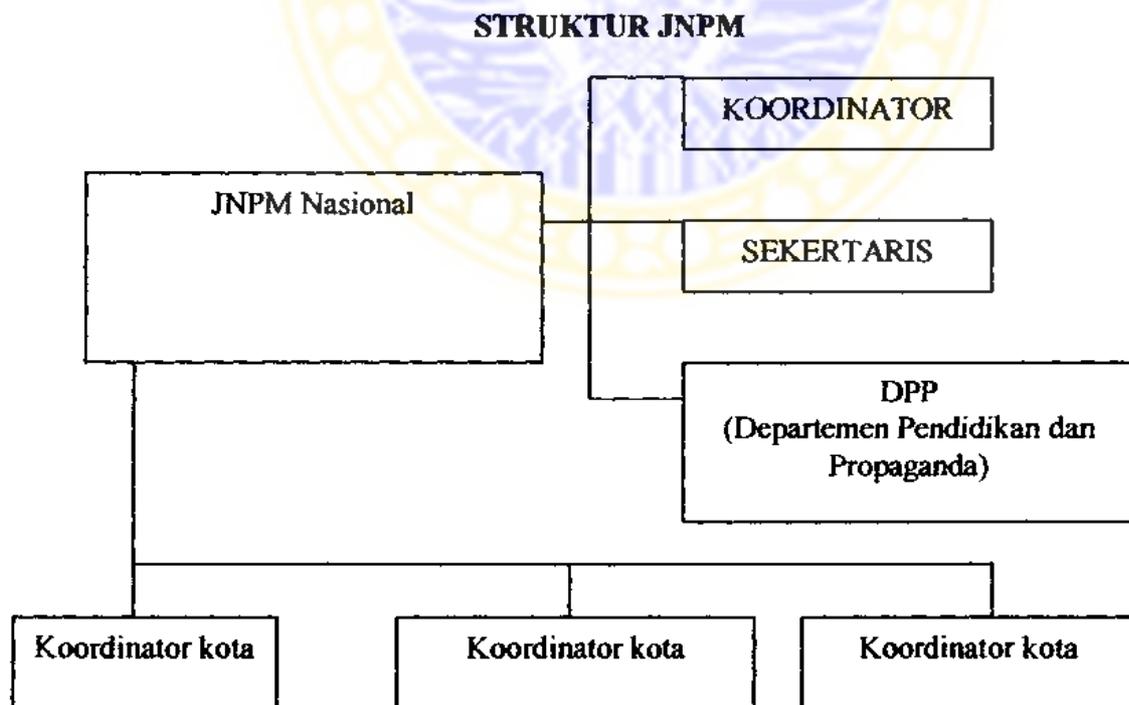
JNPM merupakan suatu jaringan nasional yang memperjuangkan isu kesetaraan gender, secara organ. JNPM memiliki perwakilan dalam tubuh LMND serta organisasi-organisasi yang tergabung dalam FPRM (Front Perjuangan Rakyat Miskin). Sedangkan secara individu, anggota JNPM adalah orang perorangan yang sepakat dengan isu perjuangan gender.

JNPM resmi terbentuk pada 21 maret 2005 melalui suatu konferensi nasional yang diprakarsai oleh PRD konferensi tersebut terbuka serta mengundang perwakilan-perwakilan organisasi perempuan se-Indonesia baik itu berbentuk ormas, LSM dan bahkan kelompok PKK sekalipun. Hasilnya berupa kesepakatan untuk membangun suara jaringan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Kesepakatan awal membentuk suatu jaringan perempuan dikarnakan dua sebab utama. Pertama, adanya suatu kesadaran bahwa di daerah kesadaran gendernya masih lemah, sehingga untuk memulai gerakan kesetaraan gender dirasa akan sangat susah. Untuk itu apabila mendirikan suatu organisasi perempuan. Dirasa akan susah untuk bertahan apabila untuk berkembang, karena situasi yang kurang mendukung maupun SDM yang masih rendah. Oleh karenanya dibentuk jaringan, dimana berguna untuk meraba-raba potensi yang ada di daerah. Alasan yang kedua, secara teknis, belum terdapat struktur organisasi yang lengkap baik dipusat maupun di daerah.

Lebih jelasnya mengenai JNPM dapat dilihat melalui pemaparan berikut ini :

- **TUJUAN/MISI GERAKAN** : membangun suatu kesadaran gender untuk mewujudkan kesetaraan gender disegala bidang kehidupan bagi seluruh perempuan Indonesia.
- **TARGET** : Mampu memperbaiki taraf kehidupan perempuan Indonesia baik secara posisi maupun kondisi.
- **SASARAN** : Mahasiswa, buruh, kaum miskin kota
- **ISU UTAMA** : Pendidikan murah bagi seluruh masyarakat Indonesia khusus lagi kesempatan bagi perempuan untuk dapat menikmati pendidikan yang setara dengan laki-laki, perbaikan kondisi buruh perempuan, perbaikan kondisi bagi perempuan miskin.

Adapun struktur jaringan JNPM dapat dilihat dari bagan tersebut dibawah ini :



Dalam struktur LMND kota terdapat koordinator JNPM yang tugasnya adalah untuk memastikan bahwa tiap-tiap komisariat terdapat suatu komite aksi atau kelompok diskusi masalah perempuan. Sedangkan mekanisme JNPM yang tergantung pada struktur LMND kota ada dua yaitu : pertama, melakukan konsolidasi minimal satu minggu sekali, kedua, melakukan diskusi minimal satu minggu sekali.



### **BAB III**

## **TEMUAN DAN INTEPRETASI DATA**

Hasil sajian data dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan dari HMI dan LMND. Wawancara dengan informan dari HMI dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2007 dengan Irina di komisariat HMI cabang Surabaya di Jln. Sumatera no. 36A – Surabaya, hari Minggu tanggal 29 April dengan Juwita dan Isnaini di komisariat HMI Fisip-Sastra cabang Surabaya di Jl.Kalidami no.79A Surabaya. Sedangkan wawancara dengan informan dari LMND dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2007 dengan Rudi di Nescafe – MM Unair, hari Kamis tanggal 26 April 2007 dengan Vivi dan Elisa di Taman Apsari Surabaya.

### **III.1. Kepentingan yang melatarbelakangi dilakukannya gerakan kesetaraan gender di dalam ormek.**

#### **III.1.1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).**

Didalam HMI dapat dikatakan bahwa gerakan kesetaraan gender yang ada bersumber dari KOHATI, meskipun harus diakui bahwa pada awal pembentukan KOHATI pemikira mengenai kesetaraan gender belum ada. Informan Juwita menjelaskan bahwa pada awalnya KOHATI dibentuk sebagai upaya untuk menampung serta menyalurkan aktivitas anggota-anggota baru

HMI, khususnya para perempuan, yang kala itu membludak pasca pembubaran PKI.

"Pada waktu PKI secara resmi dibubarkan dan dilarang, anggota-anggotanya yang berjumlah ratusan ribu tercerai-berai dan bingung untuk menyelamatkan diri. Salah satu cara yang paling aman adalah bergabung dengan organisasi yang berlatarbelakang agama. Pada saat itulah banyak orang berbondong-bondong masuk HMI. Bayangkan pada tahun '67an itu setiap kali mengadakan LK (*Latihan Kader, pen*), dihadiri oleh ribuan orang. Padahal HMI itu kan organisasi kader, bukan organisasi massa."

Berawal dari kenyataan tersebut maka dirasa perlu untuk membuat suatu saluran baru dalam organisasi untuk menampung anggota-anggota baru tersebut. Sehingga pada Kongres Nasional HMI ke VIII di Solo pada tahun 1967 diputuskan untuk membentuk KOHATI. Lebih lanjut Juwita menjelaskan bahwa aktivitas utama KOHATI kala itu hanya seputar pengajaran-pengajaran terhadap perempuan mengenai bagaimana cara menjadi istri dan ibu yang baik.

"Dulu di KOHATI yang ada hanyalah pembelajaran mengenai bagaimana cara untuk menjadi ibu dan istri yang baik. Perempuan diajari mengenai bagaimana merawat diri sewaktu hamil dan melahirkan. Tapi jangan salah, pada waktu itu para HMI wati juga dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas HMI. Misalnya ikut turun ke jalanan untuk melakukan demo anti PKI."

Penjelasan lebih lanjut bahwa pada kala itu fungsi KOHATI disesuaikan dengan kebutuhan pada masanya. Tetapi tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil kongres di Solo adalah KOHATI hadir untuk memenuhi kebutuhan perempuan, dalam hal ini para HMI wati.

Dengan semakin berkembangnya wacana mengenai kesetaraan gender ditanah air, hal ini mendapat tempat tersendiri di HMI, terutama KOHATI. HMI menerima kesetaraan gender, dengan tetap berpegangan pada asaz-asaz Islam.

"Kami menerima kesetaraan gender dan juga mengusahakannya. Kesetaraan gender yang ada tetap harus dilandasi semangat Islam. Merujuk pada surat Hujurat 13, bahwa yang membedakan manusia dihadapan Allah SWT adalah ketaqwaannya, sampai disitu kesetaraan gender dalam HMI udah selesai."

Diterima gerakan kesetaraan gender di HMI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran mengenai kondisi keterpurukan perempuan di Indonesia secara umum disegala bidang kehidupan. Informan Juwita menjelaskan bahwa masih banyak penafsiran yang keliru pada ayat-ayat Islam yang dinilai sangat merugikan perempuan.

"KOHATI memandang keliru penafsiran agama yang mendiskreditkan perempuan. Misalnya hak waris, hak setengah saksi, poligami dan lain sebagainya. Dasar HMI yaitu NDP (Nilai Dasar Perjuangan) dirumuskan oleh Alm.Cak Nur yang pemikirannya cukup moderat dan liberal, jadi dalam HMI teks-teks Islam itu kita artikan secara kontekstual."

Berawal dari kesadaran adanya keterpurukan kondisi perempuan Indonesia, gerakan kesetaraan gender di HMI mulai berjalan. Dan KOHATI dipakai sebagai alat untuk menjalankan sekaligus mencapai kesetaraan gender. Informan Juwita menjelaskan, karena dari awal posisi dan kondisi antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang, maka memang diperlukan suatu badan khusus untuk perempuan untuk mencapai kesetaraan itu.

"Harus diakui bahwa hanya sedikit saja orang yang memiliki kesadaran akan ketimpangan gender yang terjadi. Oleh karena itu akan sangat sulit untuk mengembangkan nilai kesetaraan gender dalam organisasi yang pada awalnya berisi mayoritas yang tidak atau belum sadar gender. Makanya KOHATI digunakan sebagai saluran untuk mulai menumbuhkembangkan kesadaran gender untuk lebih lanjut dikembangkan dalam HMI secara keseluruhan."

Dalam perjalanannya, keberadaan KOHATI sebagai organisasi perempuan dalam HMI yang berfungsi sebagai motor gerakan kesetaraan gender juga mendapat tantangan tersendiri dari para kader HMI, baik laki-laki maupun perempuan. Keberadaan KOHATI justru disangsikan dan dinilai bias gender.

Opini-opini yang bermunculan adalah untuk mewujudkan suatu kesetaraan gender dalam organisasi tidak diperlukan suatu badan khusus, melainkan dapat diusahakan secara bersama-sama. Lebih lanjut dijelaskan oleh informan Juwita bahwa pro-kontra mengenai keberadaan KOHATI selalu mewarnai Kongres Nasional setiap periodenya.

"Dalam tiap kongres selalu ada aja usulan untuk membubarkan KOHATI, alasannya bias gender. Aku juga termasuk yang selalu memikirkan, sebenarnya perlu nggak sih ada KOHATI untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam HMI? Tetapi setelah ditela'ah lebih lanjut, harus diakui bahwa sehubungan dengan gerakan kesetaraan gender di dalam HMI, KOHATI tetap dibutuhkan keberadaannya. Kembali lagi kaya kataku tadi, nggak mungkin nilai-nilai kesetaraan gender itu bisa langsung tumbuh dalam organisasi yang sejak dulu didominasi laki-laki, dengan kesadaran gender yang rendah. Perlu diberi wadah dulu untuk dapat diakomodasi dan dikembangkan."

Lebih lanjut informan Juwita menjelaskan, mengenai keberadaan KOHATI dalam HMI sebagai alat gerakan kesetaraan gender, KOHATI juga merupakan media potensial untuk pengembangan eksistensi HMI diluar. Hal ini dirasa menguntungkan bagi HMI.

"Seenggaknya keberadaan KOHATI itu berguna juga bagi HMI secara organisatoris. Kalau ada yang bilang gerakan kesetaraan gender yang dilakukan oleh KOHATI itu belum berhasil, atau gagal, seenggaknya KOHATI itu sendiri bisa jadi alat bagi HMI untuk keluar. Kita bisa menjalin kerjasama dengan organisasi atau LSM perempuan lain dengan membawa nama HMI."

Mengenai kepentingan adanya gerakan kesetaraan gender dalam organisasi, informan juwita menjelaskan bahwa gerakan kesetaraan gender dalam HMI melalui KOHATI adalah untuk perbaikan dalam internal organisasi itu sendiri, sekaligus sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat luar. Perbaikan internal organisasi dimaksudkan untuk lebih lagi meningkatkan kesadaran gender para kader, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pengabdian terhadap masyarakat berupa program-program pemberdayaan perempuan.

"Gerakan kesetaraan gender dalam HMI melalui KOHATI adalah sebagai pr internal. Tidak semua orang memiliki kesadaran gender, paling-paling hanya segelintir saja. Para kader yang masuk HMI telah memiliki mindset sendiri-sendiri mengenai relasi gender. Diharapkan melalui adanya gerakan kesetaraan gender yang diupayakan melalui KOHATI, dapat menumbuhkan serta meningkatkan lebih lagi kesadaran gender mereka. Sedangkan untuk kepentingan keluarnya, kita melaluka pemberdayaan terhadap masyarakat umum. Ada tiga cabang KOHATI, aku lupa pastinya cabang dikota mana, di Kalimantan yang melakukan pemberdayaan terhadap perempuan pesisir."

Informan Isnaini, memberikan keterangan yang kurang lebih senada mengenai adanya gerakan kesetaraan gender dalam HMI. Dijelaskan bahwa gerakan kesetaraan gender yang ada dalam HMI, merupakan suatu kesadaran yang bertolak dari keadaan perempuan secara umum yang masih termarginalisasi. Dan didalam HMI kenyataan ini juga terjadi, dimana perempuan HMI sendiri kurang mendapat ruang gerak dan pengakuan akan keberadaan dan intelektualitasnya.

"Perempuan HMI kurang diakui eksistensinya, dan ruang geraknya pun juga terbatas. Makanya kita wadah tersendiri, yaitu KOHATI. Melalui KOHATI ini gerakan kesetaraan gender diusahakan. KOHATI mengakomodasi kepentingan kita. Misalnya kalo di HMI, pengurus mengadakan rapat sampai malam, nggak kenal waktu. Tapi kalo di KOHATI kan bener-bener ngerti perempuan, waktu rapatnya disesuaikan."

Sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Juwita dan Isnaini, informan Irina juga menuturkan adanya gerakan kesetaraan gender dalam HMI yang dimotori oleh KOHATI. Gerakan kesetaraan gender, untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan gender, dilakukan untuk sebesar-besarnya kebaikan kader itu sendiri.

"Patriarki telah menyebabkan berbagai macam ketertindasan perempuan. Harus diakui, didalam organisasipun ruang gerak perempuan terbatas. Berapa banyak sih perempuan yang mampu duduk dalam kepengurusan HMI dan memegang posisi yang penting? Sejauh ini saja baru ada dua orang perempuan yang mampu menduduki posisi ketua cabang. Oleh karena itu KOHATI ada sebagai wadah aktualisasi kader perempuan HMI. Juga dalam KOHATI kami mengembangkan nilai-nilai kesetaraan gender yang sesuai dengan Islam, yang berkeadilan gender."

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan Irina tersebut diatas, ditegaskan sekali lagi bahwa HMI mengembangkan suatu gerakan kesetaraan gender yang bernafaskan Islam dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan para kader perempuan HMI. Keterbatasan ruang gerak serta kesempatan untuk mengaktualisasikan diri bagi para HMI wati menjadi alasan serta tujuan untuk diadakannya suatu gerakan kesetaraan gender didalam organisasi.

"Tapi kami tidak pernah memaksakan nilai-nilai mengenai keadilan gender pada kader, baik laki-laki maupun perempuan. Juga tidak dapat kami paksakan untuk semua orang memiliki pemahaman yang sama. Yang ada kami berupaya untuk mengembangkan nilai-nilai itu baik pada laki-laki maupun perempuan. Setiap acara KOHATI tidak melulu dihadiri oleh perempuan HMI, laki-laki juga turut berpartisipasi. Tapi ya itu, jumlahnya sangat terbatas. Masih ada pemikiran bahwa KOHATI itu acara khusus HMI wati, jadi mereka juga masih rendah partisipasinya."

Ditambahkan lagi bahwa, adanya gerakan kesetaraan gender yang diusahakan oleh KOHATI merupakan reaksi atas mulai merebaknya teori-teori feminisme yang berasal dari barat.

"Kesadaran gender yang berusaha kami tumbuh kembangkan di KOHATI harus berdasarkan Islam. Jangan sampai kita terpengaruh oleh beragam teori feminisme dari barat yang kurang sesuai dengan budaya Indonesia dan Islam. Jangan-jangan nanti perempuan tidak mau kawin, tidak mau melahirkan lagi. Kan gawat kalo sampai disesatkan kayak gitu."

Gerakan kesetaraan gender dalam HMI bukan hanya untuk kepentingan HMI sendiri, tetapi juga untuk kebaikan nilai-nilai Islami yang dikembangkan dalam HMI.

### III.1.2.Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Sejak awal pembentukannya, LMND mengakui adanya posisi yang setara antara laki-laki dan perempuan sekaligus menyadari bahwa selama

ini di Indonesia perempuan masih mengalami berbagai diskriminasi dan marginalisasi. Menurut informan Rudi penyebab utama ketertindasan perempuan Indonesia adalah budaya feodalisme yang belum tuntas, sehingga perempuan masih terus dipandang sebagai warga negara kelas dua. Masih menurut informan Rudi, belum tuntasnya feodalisme kemudian disusul dengan masuknya kapitalisme. Kapitalisme menyebabkan ketertindasan perempuan lebih lagi, misalnya upah buruh perempuan yang lebih rendah dari laki-laki, eksploitasi perempuan, serta dijadikannya perempuan sebagai pangsa pasar yang menguntungkan.

"Kondisi perempuan Indonesia masih tertindas karena adanya ideologi patriarki, yang terwujud dalam feodalisme, lebih lagi kapitalisme. Kesadaran perempuan itu sendiri masih terbelenggu, sehingga mereka masih disibukkan seputar masalah peran tradisional."

Kesadaran gender telah ada sejak berdirinya LMND, yang kemudian dibarengi dengan gerakan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Gerakan yang ada berupa upaya-upaya penyadaran, tidak hanya kedalam organisasi tetapi juga keluar organisasi, tidak hanya bagi laki-laki tetapi juga untuk perempuan itu sendiri, bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk bisa eksis didunia publik. Dengan digugahnya kesadaran mengenai persamaan posisi kedua gender tersebut, diharapkan akan semakin terbuka juga kesempatan perempuan untuk dapat bersaing dengan laki-laki.

"LMND mencoba untuk menumbuhkan kesadaran itu, bahwa perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki. Di LMND sendiri perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan saing yang sama untuk meraih posisi-posisi dalam organisasi. Bahkan perempuan lebih mampu menyedot perhatian ketika dia menempati posisi tertentu, jadi lebih menarik, harus diakui. Misalnya mbak Dita (*Dita Indah Sari, pen*), fenomenal sekali kan dia pada waktu itu."

Gerakan kesetaraan gender yang telah ada sejak awal berdirinya LMND adalah bertujuan untuk memperbaiki posisi dan kondisi kaum perempuan. Gerakan kesetaraan gender telah ada sejak berdirinya LMND, dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa pada saat Kongres I di Bogor pada tahun 1999 yang diikuti oleh sekitar 30 komite aksi, salah satunya adalah SPID (Solidaritas Perempuan Indonesia untuk Demokrasi). SPID merupakan salah satu organisasi perempuan yang mendukung berdirinya LMND kala itu. Informan Rudi melanjutkan, LMND mendukung serta melaksanakan gerakan kesetaraan gender karena dari awal nilai-nilai kesetaraan itu sendiri telah ada dalam azas LMND yaitu demokrasi kerakyatan.

"Siapa pun yang mau bergabung dengan LMND harus setuju dengan perjuangan kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu inheren dalam LMND. Dulu berdirinya LMND juga atas dukungan organisasi-organisasi perempuan yang gigih memperjuangkan kesetaraan gender. Dan sesuai dengan azas kita, demokrasi kerakyatan, disitu jelas ada nilai-nilai tentang kesetaraan dan keadilan."

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan informasi yang juga diterima dari informan Vivi. Dijelaskan bahwa komite-komite aksi yang mendirikan LMND memiliki agenda yang kurang lebih sama yaitu mencapai Indonesia yang lebih demokratis. Dengan harapan bahwa perempuan Indonesia tidak memiliki posisi yang stagnan dan turut ambil bagian dalam perombakan sistem.

Sejalan dengan informan Rudi dan Vivi, informan Elisa juga menegaskan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender telah ada di LMND sejak awal berdirinya organisasi tersebut. Dengan asaz demokrasi kerakyatannya, nilai

kesetaraan gender mendapat tempat tersendiri dan dikembangkan oleh para anggotanya.

"Kesetaraan gender itu udah ada sejak LMND berdiri. LMND ada kan karena ingin mengadakan perubahan disegala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang mengalami ketimpangan. Makanya berawal dari kesadaran gender itu, sejak mulai berdiri LMND gerakan kesetaraan gender itu juga uda ada."

Informan Vivi menjelaskan lebih lanjut bahwa gerakan kesetaraan gender yang ada di LMND merupakan gerakan menuju kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan yang harus diusahakan bersama, bukan gerakan laki-laki melawan perempuan. Meski harus diakui bahwa perjuangan kesetaraan gender yang ada umumnya berawal dari organisasi-organisasi perempuan, sehingga terkesan perempuan berjuang untuk perempuan.

"Perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang setara, tapi telah terjadi penindasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh ideologi patriarki. Tapi bentuk perjuangan dalam LMND adalah perempuan bersama-sama dengan laki-laki mengusahakan kesetaraan gender, bukan perempuan melawan laki-laki."

Meski diakui kesetaraan itu telah mulai nampak, tapi masih terbatas pada posisi. Yang ingin diusahakan oleh LMND adalah perubahan menuju kesetaraan gender yang lebih esensial. Dimana bukan hanya memperlakukan posisi serta kondisi kaum perempuan, tetapi juga untuk merekonstruksi pola pikir mengenai perempuan yang selama ini membelenggu ruang gerak perempuan.

"Memang sih sekarang banyak perempuan yang menempati posisi publik yang tinggi dan penting, kita juga udah punya presiden perempuan. Terus perempuan yang pendidikannya tinggi juga banyak. Tapi kan terbatas pada kalangan tertentu. Kenapa kok tidak bisa merata? Karena pola pikirnya belum sepenuhnya berubah. Kesadaran gender itu memang sangat susah untuk ditumbuhkan, kok yang cowok, orang cewek-cewek juga masih banyak yang nggak sadar gender kok"

Gerakan kesetaraan gender yang ada di LMND mulai dapat dilihat sejak pertama kali seseorang bergabung dengan LMND. Sejak awal berdirinya

LMND, telah ada materi tentang gender yang diberikan saat PCA (Pendidikan Calon Anggota). Hal ini dilakukan ditengah-tengah LMND yang pada awalnya memiliki mayoritas anggota laki-laki. Dan informan Vivi menjelaskan bagaimana anggota laki-laki di LMND dirasa lebih dapat menghargai perempuan.

"Cowok-cowok LMND itu lebih menghargai perempuan menurutku. Dulu pertama kali gabung juga mulanya takut-takut gitu. Kan anggotanya mayoritas cowok. Tapi setelah tau, ternyata mereka respek ke cewek. Nggak diistimewakan, tapi juga nggak dibedakan. Tapi dihargai. Ketua LMND kota Surabaya yang sebelumnya kan juga cewek, anak UPN 2004."

Dengan berjalannya waktu, dibentuklah JNPM (Jaringan Nasional Perempuan Mahardika) yang juga 'buka cabang' di LMND. Semenjak itu gerakan kesetaraan gender yang ada di LMND tidak hanya terbatas pada mahasiswa saja, tetapi juga mampu menjangkau buruh, kaum miskin kota dan petani. Menurut informan Vivi, dengan adanya JNPM, LMND mencoba untuk menggabungkan mahasiswa – buruh – kaum miskin – dan petani untuk secara keseluruhan memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan tujuan yang lebih jauh adalah untuk melibatkan perempuan dalam usaha merombak sistem yang ada.

Gerakan kesetaraan gender yang diusahakan oleh LMND memiliki tujuan kedalam dan keluar. Informan Vivi menjelaskan bahwa untuk kedalamnya, dikembangkannya gerakan kesetaraan gender adalah untuk merekrut lebih banyak lagi anggota. Harus diakui akhir-akhir ini isu mengenai gender dan perempuan menjadi menarik dan menyedot perhatian. Maka diakomodasikannya wacana ini dalam suatu gerakan dalam organisasi diharapkan mampu menarik perhatian dan ketertarikan untuk bergabung dalam LMND.

"Kita mau nunjukin, ini lho dalam LMND itu ada suatu kesadaran gender, ada kesetaraan gender disini. Laki-laki dan perempuan setara kedudukannya. Jadi nggak perlu takut untuk masuk LMND, terutama yang cewek-cewek."

Sedangkan untuk tujuan keluarnya, adalah sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Upaya untuk menyadarkan kaum perempuan bahwa mereka selama ini tertindas oleh patriarki yang merasuk kedalam semua bidang kehidupan. Dengan terbangunnya kesadaran, mampu menghadirkan ruang gerak yang lebih bebas bagi perempuan untuk bersaing secara sehat dan mengambil pilihan.

Sejalan dengan informan Rudi dan Vivi, informan Elisa mengungkapkan bahwa gerakan kesetaraan gender yang ada dalam LMND merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak kaum perempuan Indonesia yang telah sekian lama tertindas. Nilai-nilai demokratis yang dikembangkan dalam LMND sangat mendukung untuk dikembangkannya gerakan kesetaraan gender.

"Kesetaraan gender itu kebutuhan mendesak bagi perempuan. Sekian lama tertindas dan dipinggirkan, perempuan selalu saja dirugikan, dikotak-kotakkan, dibilang 'yah sudah memang kodratnya gitu'. Padahal kodrat perempuan hanya mengandung, melahirkan dan menyusui. Selbihnya adalah gender. LMND mencoba untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran ini."

Gerakan kesetaraan gender di LMND merupakan reaksi atas kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sekaligus jawaban atas perubahan yang diinginkan menuju arah yang lebih ideal.

### **III.2.Strategi yang dilakukan ormek dalam menggalang idiologi kesetaraan gender.**

#### **III.2.1.Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).**

Dalam melakukan gerakan kesetaraan gender, ormek memiliki strategi berbeda-beda yang disesuaikan dengan sasaran serta tujuan yang ingin dicapai. Dalam HMI pendekatan yang dilakukan untuk memunculkan gerakan kesetaraan gender dimulai dari pendekatan bersifat personal, yang diusahakan dalam KOHATI. Gerakan kesetaraan gender dalam HMI diutamakan untuk kebaikan para HMI wati, maka usaha yang dilakukan adalah seputar kajian serta diskusi-diskusi, sebagaimana dijelaskan oleh informan Irina.

"KOHATI secara rutin melakukan kajian-kajian pencerahan untuk anggota HMI. Bisa berbentuk diskusi, atau kegiatan-kegiatan pengembangan diri lainnya. Intinya kalau disini, bagaimana membekali HMI wati agar tidak kalah dengan HMI wan yang lain."

Selain mengadakan kegiatan bagi internal organisasi, HMI melalui KOHATI membuka diri melalui diskusi-diskusi yang terbuka bagi umum seputar isu perempuan. Irina lebih lanjut menjelaskan bahwa HMI turut mengadakan kerjasama dengan pihak luar, misalnya LSM atau ormek lainnya, dalam melakukan gerakan kesetaraan gender.

"Kita juga menjalin kerjasama dengan pihak lain, bisa jadi LSM atau ormek lain, kalau mau ngadain acara. Misalnya mengundang pembicara luar. Tapi tetap sesuai panduan kita, biar nggak melenceng juga nanti materinya."

Sejalan dengan informasi yang diberikan oleh informan Irina, informan Isnaini juga menjelaskan bahwa gerakan kesetaraan gender dalam HMI terutama berwujud pendidikan gender yang berupa forum-forum diskusi.

"HMI melalui KOHATI mengadakan secara rutin forum-forum diskusi mengenai isu-isu gender. Tidak hanya untuk internal HMI, tetapi juga untuk masyarakat umum. Misalnya, kita mengadakan seminar mengenai KDRT yang kemarin itu. Untuk sosialisasi juga ke masyarakat umum mengenai apa dan bagaimana KDRT itu."

Informan Isnaini menilai kegiatan diskusi-diskusi itu merupakan sarana yang tepat untuk menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender didalam HMI.

Dan kegiatan ini bukan diarahkan pada kaum perempuan HMI semata, tapi untuk semua kader-kader HMI secara keseluruhan.

"Diskusi itu kan semacam pendidikan, jadi diharapkan kita mampu menyerap ilmunya. Dan yang paling penting ya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan diskusi yang diadakan oleh KOHATI dengan isu-isu gender nya itu tidak sebatas untuk perempuan aja, tapi untuk semua kader HMI."

Informan Juwita menjelaskan bahwa pada dasarnya gerakan gender yang dilakukan oleh HMI harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Tapi wujud nyatanya relatif sama yaitu berbentuk diskusi, seminar, atau bahkan aksi turun kejalan sebagai reaksi atas isu-isu perempuan yang tengah berkembang di masyarakat.

"Gerakannya yang pasti berbentuk forum-forum diskusi atau seminar. Bisa internal, atau eksterna. Misalnya sosialisasi KDRT. Dan kita sebisa mungkin turut melibatkan laki-laki dalam forum kita, meski tingkat partisipasinya masih rendah. Dan juga gerakan demo-demo kejalan, menentang poligami misalnya. Kondisional aja."

Informan Juwita menambahkan, juga dirasa penting adalah bagaimana mempraktekkan nilai-nilai kesetaraan gender itu dalam kehidupan sehari-hari. Penulis mencatat, bahwa selama dilakukan wawancara dengan informan Juwita dan Isnaini di komisariat HMI Fisip-Sastra cabang Surabaya, terlihat 2 orang kader HMI laki-laki sedang membersihkan dan menyapu ruang tamu.

"Iya, nggak cuma melalui diskusi aja kita sosialisasikan nilai kesetaraan gender. Tapi lebih penting bagaimana prakteknya dilapangan, sehari-harinya. Bagaimana hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam HMI. Kita semua setara disini. Nggak ada diskriminasi."

Ditambahkan oleh Informan Isnaini, bentuk gerakan kesetaraan gender yang ada tidak hanya melulu dalam bentuk sosialisasi berupa pendidikan,

tetapi juga diwujudkan dalam aksi-aksi turun kejalan dalam rangka memperingati peristiwa tertentu.

"Kita juga aktif turun kejalan kalo ada acara apa gitu. Misalnya waktu hari ibu, itu digunakan KOHATI, dengan membawa nama HMI, untuk melakukan aksi damai turun kejalan. Menyebarkan tulisan untuk mengingatkan lagi bahwa nasib perempuan, ibu pada khususnya, masih memprihatinkan di Indonesia. Momen semacam itu menjadi pas untuk menyuarakan kepentingan perempuan."

Hal ini juga sejalan dengan dengan informasi yang diberikan oleh Informan Juwita, bahwa aksi turun langsung ke jalan juga merupakan salah satu bentuk gerakan kesetaraan gender yang ada dalam HMI

"Waktu Mayday 2006 kemarin (*1 Mei 2006, pon*), kita ikut turun ke jalan. KOHATI bersama-sama dengan HMI demo meyuarkan kepentingan buruh, terutama buruh perempuan. Itu juga salah satu bentuk gerakan gender kita."

Terlepas dari siapa yang berpartisipasi, HMI wati atau HMI wan, atau tinggi rendah tingkat partisipasinya, forum-forum yang diadakan KOHATI diusahakan selalu berkelanjutan sesuai dengan program kerja yang ada.

### III.2.2. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Tidak jauh berbeda dengan HMI, usaha yang dilakukan oleh LMND dalam menjalankan gerakan kesetaraan gendernya adalah berupa forum-forum diskusi yang dilakukan oleh JNPM secara berkala. Tapi yang paling penting adalah bahwa LMND mencoba untuk se-flexible mungkin menghadapi sasaran serta menyesuaikan isu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dijelaskan oleh informan Vivi, dikalangan mahasiswa gerakan kesetaraan gender dapat berupa diskusi-diskusi lorong.

"Kalo kita masuk ke mahasiswa, kita masukin pendidikan gender dalam diskusi-diskusi kecil. Mahasiswa kalau diajak ngomong teori dan contoh kasus kan kurang lebih pasti ngeh. Tapi lain lagi kalo kita ngomongnya ke buruh atau ke masyarakat miskin"

Ditambahkan oleh informan Elisa, gerakan kesetaraan gender di kalangan mahasiswa berbentuk pendidikan lewat diskusi-diskusi, baik yang bersifat formal atau informal, intern ataupun terbuka untuk umum.

"Ditiap kampus LMND punya kelompok diskusi perempuan, membahas seputar feminisme dan gender. Kelompok diskusi ini nggak cewek aja pesertanya, cowok juga. Dan nggak mesti untuk anak-anak LMND aja."

Lanjut informan Vivi, gerakan kesetaraan gender yang diusahakan LMND pada buruh dan kaum miskin memiliki pendekatan yang berbeda. Apabila sasarannya buruh, maka terlebih dahulu diidentifikasi kebutuhan buruh perempuan. Lalu LMND mengadakan penempatan anggotanya untuk melebur dan turut hidup bersama-sama dengan mereka, sehingga mengerti lebih jauh mengenai keseharian dan kebutuhannya.

"Kalau kita turun ke buruh, kita nggak mungkin ngomong soal teori-teori feminisme, mereka nggak ngerti. Yang kita omongin pasti soal upaya untuk bisa dapet upah yang sama dengan buruh laki-laki. Atau usaha untuk memperjuangkan cuti haid bagi mereka. Dan sebelumnya kita harus udah mendekati mereka secara pribadi. Hidup bareng mereka, supaya kita juga jadi ngerti kebutuhan sehari-harinya itu apa."

Informan Rudi juga mengungkapkan informasi serupa, bahwa pendekatan yang ditujukan pada buruh dan masyarakat miskin kota berbeda dengan pendekatan yang diusahakan pada mahasiswa. Kesetaraan gender pada mahasiswa diusahakan lewat pendidikan, tetapi untuk buruh dan kaum miskin kota diusahakan lewat keseharian mereka.

"Kita masuk lewat serikat buruh nya dulu, lalu melakukan pendekatan secara personal. Supaya ngerti kebutuhan gender perempuan miskin kota, ya harus jadi perempuan miskin kota. Supaya ngerti kebutuhan gender buruh perempuan, ya harus jadi buruh perempuan. Masuknya lewat praktek sehari-hari kehidupan mereka. Kontradiksi-kontradiksi."

Masih menurut informan Rudi, bentuk sosialisasi isu gender melalui pendidikan tidak hanya dalam bentuk lisan semata, tetapi juga melalui tulisan.

"Selain kelompok diskusi, LMND juga secara rutin menerbitkan tulisan-tulisan berisi pendidikan gender. Bisa pamflet atau news letter. Selain itu juga kedepannya kita secara bertahap berusaha untuk memperluas jaringan JNPM."

Dapat dikatakan gerakan kesetaraan gender di LMND diperoleh melalui proses sosialisasi dalam bentuk pendidikan yang sensitif gender. Dan secara nyata hasil dari gerakan kesetaraan gender yang diusahakan tercermin dari daya saing yang bebas dan sehat para anggota LMND, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dapat berpartisipasi dalam organisasi. Bersaing untuk dapat mencapai posisi-posisi strategis tanpa ada diskriminasi usia dan gender. Terlepas dari itu semua, yang terpenting adalah cara mempraktekkan nilai-nilai yang telah ditanamkan melalui pendidikan tersebut dalam tingkah laku keseharian.

### **III.3. Hambatan yang dihadapi oleh ormek dalam menggalang ideologi kesetaraan gender.**

#### **III.2.1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).**

Sebagai nilai yang hendak menggeser nilai-nilai telah mapan hasil konstruksi sosial sekian lamanya, gerakan kesetaraan gender mendapat berbagai tantangan dan hambatan. Hal demikian ini juga terjadi didalam ormek. Di HMI hambatan tersebut terutama bersumber dari SDM kader itu sendiri. Diakui oleh informan Irina sangat susah untuk menumbuhkan kesadaran gender dalam diri masing-masing kader. Pemahaman sedemikian rupa mengenai relasi gender yang telah dibawa masing-masing kader cukup susah untuk dirubah.

"Tidak hanya laki-laki, para HMI wati sendiri masih banyak yang nggak sensitif gender. Pemikirannya masi gitu-gitu aja, perempuan fungsinya seputar pendukung aja. Hanya pantas menempati posisi bendahara, atau administrasi. Akhirnya ya apatis juga."

Hal senada juga disampaikan oleh informan Isnaini, bahwa pola pikir HMI wati yang sedemikian rupa terkonstruksi oleh pemikiran yang patriarkis menjadi hambatan tersendiri bagi gerakan kesetaraan gender yang ada di HMI.

"HMI itu akomodatif dan terbuka untuk adanya gerakan kesetaraan gender. Tapi kita balikin lagi ke anggota-anggotanya itu sendiri. Sejauh mana kesadaran itu menyebar dan terbangun. Cewek-cewek HMI itu brapa banyak sih yang bener-bener sadar gender. Jadi kan susah, kaya ada 1 orang yang sadar gender dan berusaha mengusahakan perubahan, tapi yang dihadapi 50 orang lainnya yang bener-bener blank. Itu ceweknya, apalagi cowoknya."

Kembali menurut pengakuan informan Irina, dalam kesehariannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan KOHATI juga mendapat hambatan tersendiri. Biasanya berupa kendala pribadi kader, seperti keterbatasan alat transportasi, susah membagi waktu, atau bahkan tidak mendapat ijin orang tua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan KOHATI yang memakan waktu agak lama.

"Kadang HMI wati itu manja juga. Kalau ada kegiatan apa gitu, mereka juga jarang datang. Alasannya nggak ada yang nganterlah, angkutan umum susah lah. Atau kalo acaranya malem, mereka nggak dapet ijin orang tuanya."

Mengenai hal ini, diakui juga oleh informan Isnaini, bahwa waktu menjadi salah satu kendala bagi dirinya untuk dapat berpartisipasi pada acara-acara yang diadakan oleh KOHATI.

"Repot mbagi waktunya. Aku kan juga sibuk di kom (*komisariat HMI Fisip-Sastra, pen*) soalnya. Waktu KOHATI ngadain diskusi, aku lagi sibuk rapat di kom. Waktunya sering benturan."

Selain itu yang tidak kalah penting adalah pendanaan. Masih menurut informan Irina, pendanaan yang terbatas juga menjadi hambatan bagi ruang gerak KOHATI. Selama ini kegiatan-kegiatan KOHATI masih

menggantungkan pendanaan dari sumbangan-sumbangan bebas, yang terutama bersumber dari alumnus KOHATI yang disebut FORHATI.

Mengenai Islam sendiri sebagai asas dan dasar ideologi HMI, informan Juwita kembali menegaskan hal tersebut sama sekali bukan hambatan untuk gerakan kesetaraan gender di dalam organisasi.

"HMI mengakui dan mendukung gerakan kesetaraan gender, berdasar pada surat Hujurat 13. yang ada sekarang adalah bagaimana kita, melalui KOHATI sebagai alat HMI mencapai kesetaraan gender, melakukan gerakan kesetaraan gender itu secara konsekuen."

Terlepas dari semua pro dan kontra mengenai keberadaan KOHATI sendiri dan gerakan yang dilakukannya didalam HMI, setidaknya KOHATI tetap dapat menjadi alat HMI untuk melakukan gerakan perempuan keluar organisasi. Hal ini ditambahkan oleh informan Juwita.

### III.3.2. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Berbeda dengan HMI, LMND mengalami kesulitan dalam gerakan kesetaraan gendernya sehubungan dengan organisasi itu sendiri. Diakui oleh informan Vivi, dikalangan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, telah ada pencitraan yang kurang baik pada LMND sehingga ruang geraknya pun menjadi tidak bebas.

"Aku sendiri susah untuk mendekati anak-anak lain dikampusku. Baru ngobrol dikit aja, terus aku coba untuk ngajak mereka ikut diskusi gender, biasanya langsung ditinggal. Mereka kaya alergi atau ketakutan gitu kalo udah dideketin anak LMND."

Lingkungan yang antipati terhadap LMND dirasakan oleh informan Vivi dilingkungan kampusnya yaitu di UNESA – Lidah. Tidak hanya sesama mahasiswa, bahkan dosenpun juga turut melakukan diskriminasi terhadap

anggota LMND. Misalnya mempersulit mereka dalam mengumpulkan tugas akademik. Hal ini jelas menjadi penghambat tersendiri.

"Aku kalo lagi main-main ke UNESA Ketintang, kadang ada aja yang ngejek sinis gitu. Dibilangin Gerwani lah. Udah gitu kalo anak-anak LMND lagi ngumpul, Cuma ngobrol biasa aja, udah dicurigai. Didatengin dosen, ditanyain lagi ngapain. Apalagi kalo kita ngadain diskusi nyantai gitu, wah tambah dicurigai dan disirikin."

Permasalahan bentuk organisasi dan status mahasiswa juga menjadi masalah saat anggota LMND diterjunkan ke buruh pada khususnya. Untuk dapat mendekati buruh, mereka harus menanggalkan status ke-mahasiswaannya, sebagaimana dijelaskan oleh informan Vivi.

"Kalo kita masuk ke buruh, kita nggak akan bilang kita ini mahasiswa, anak LMND. Kita akan bilang kita orang JNPM. Buruh itu komunitas yang tertutup banget. Kalau ke masyarakat miskin kota mending, kita masih bisa pake identitas mahasiswa."

Selain itu hambatan lain juga berasal dari internal organisasi LMND. Seringkali terjadi benturan waktu antara program LMND dengan program JNPM yang datang dari pusat. Akhirnya waktu pelaksanaannya menjadi molor, dan bahkan ada saja program yang tidak terlaksana sama sekali.

"LMND nasional ngasi program ke kota. Dari JNPM nasional juga ngasi program yang terjadwal ke kita. Akhirnya benturan deh, programnya tumpang tindih. Ya pelaksanaannya jadi molor juga."

Informan Rudi menjelaskan faktor lain yang menjadi hambatan bagi gerakan kesetaraan gender yang dilakukan LMND. Doktrin agama yang telah melekat, disertai kuatnya ketokohan tertentu disuatu daerah, menjadi hambatan kuat untuk melakukan sosialisasi isu-isu gender.

"Pemah di Lamongan kita ngadain acara diskusi gender, ngurus ijinnya aja susah. Udah gitu yo sepi. Karena daerah itu udah dikuasai oleh ormas tertentu dengan penyebaran doktrin agama yang sangat kuat."

Selain itu, informan Elisa menjelaskan bahwa kekurangan SDM dalam organisasi sendiri menjadi kendala serius. Kekurangan SDM tersebut

membuat 1 orang merangkap untuk 2 jabatan sekaligus, sehingga porsi kerjanya menjadi lebih banyak.

"Jabatan di LMND masih suka dirangkep-rangkep. Misalnya Vivi, dia ketua kota sekaligus koordinator JNPM untuk Surabaya. Jadi tugasnya banyak kan, susah juga bagi waktunya."

Dan yang jelas, menurut pengakuan informan Rudi, selama ini isu mengenai gender belum mendapat prioritas di LMND. Di LMND terdapat isu-isu yang masuk dalam skala prioritas, terutama yang berhubungan dengan masalah politik praktis. Isu gender masih menjadi agenda rutin yang sejauh ini belum masuk dalam daftar prioritas.

"Kita punya skala prioritas, dan itu kondisional. Kita ngerespon segala dinamika politik yang terjadi. Untuk masalah kesetaraan gender, sampai sekarang belum dibuatkan program khusus. Masih berupa program rutin aja. Dan dari awal memang udah kaya gini."

Selain itu, seperti juga di HMI, pendanaan juga menjadi salah satu kendala di LMND. Keterbatasan biaya terkadang mengganggu kelancaran program-program yang telah direncanakan, seperti dituturkan oleh informan Elisa.

"Duitnya kan terbatas, jadi untuk bisa buat acara yang agak gede untuk eksternalnya juga kita terbatas. Tapi kalo hanya untuk kegiatan diskusi rutin LMND di sel-sel sih nggak ada masalah."

Masalah pendanaan ini akhirnya menjadi kendala, meski nilai tidak serius, untuk mengembangkan gerakan kesetaraan gender di luar LMND. Terutama pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan, seperti seminar misalnya.

## **BAB IV**

### **INTEPRETASI TEORITIK**

Analisa dari Smelser membagi gerakan social kedalam 6 tahapan berbeda. Tahapan-tahapan tersebut adalah **Structural Conductiveness, Structural Strain, Spread of Generalized Beliefs, Precipitating Factors, Mobilization of Participants for Actions, serta The Operation of Social Control.** Menurut Mark N. Hagopian bahwa periode (tahap) 1 sampai 4 gerakan sosial Neil Smelser, dinamakan masa inkubasi. Tahap ke-5 adalah periode aksi dan tahap ke-6 merupakan periode adaptasi atau institusionalisasi.

Penindasan terhadap perempuan disegala bidang kehidupan hasil dari konstruksi sosial yang patriarkis memberi perspektif awal bagi mahasiswa untuk melakukan gerakan kesetaraan gender dalam ormek. Hal inilah yang disebut dengan aspek **structural conductiveness** dalam analisa Smelser. Berawal dari kesadaran mengenai adanya relasi gender yang tidak seimbang dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sehingga merugikan salah satu gender yaitu perempuan, maka dimulailah gerakan kesetaraan gender dalam ormek.

Aspek **structural conductiveness** disini adalah sistem sosial dalam masyarakat yang mendiskriminasi perempuan, dimana praktek-praktek tersebut turut dilegitimasi tidak hanya oleh kultur, misalnya penafsiran terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga oleh struktur yaitu negara. Maka disinilah mahasiswa mengambil posisi, karena mahasiswa diidentikkan sebagai kekuatan yang berpotensi sebagai kekuatan oposisi negara.

Adanya kesenjangan dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan tersebut pada akhirnya menimbulkan frustrasi bagi mahasiswa. Perasaan ini oleh Ted Robert Gurr disebut dengan Relative Deprivation ( Deprivasi Relatif). Perasaan deprivasi, yaitu ketidakpuasaan terhadap situasi, dialami mahasiswa karena dia merasa mampu dan pantas, serta mempunyai hak untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan disini adalah terciptanya keadaan yang lebih adil bagi perempuan, yaitu kesetaraan gender. Sebagaimana Phillip G Albatch menyimpulkan adanya 2 fungsi gerakan mahasiswa dalam proses perubahan, yaitu untuk menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik.

Denton E Morrison mengatakan bahwa gerakan sosial seringkali tumbuh dari kelompok sosial yang relatif berpengalaman, yang menginginkan perubahan secara kontinyu.

Hal inilah yang dirasakan oleh HMI dan LMND. Keadaan sosial yang telah sedemikian rupa, akhirnya menumbuhkan kesadaran bahwa telah sekian lama terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh gender perempuan. Sama-sama menyadari hal ini, maka dalam rangka merubah keadaan menuju kehidupan yang dianggap lebih ideal, diadakanlah gerakan kesetaraan gender dalam ormek.

Aspek structural conductiveness tersebut ditambah lagi dengan aspek structural strain. Yang dimaksud dengan aspek structural strain disini adalah ketegangan-ketegangan dalam masyarakat sebagai akibat dari berbagai macam perubahan dan fluktuasi sosial-politik-ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia berimbas disegala bidang kehidupan sehingga menimbulkan gesekan sosial. Tekanan ekonomi mengakibatkan masyarakat mulai lantang bersuara, menyuarakan segala

kesulitan dan ketidakadilan yang mereka alami. Salah satunya adalah ketertindasan perempuan. Hal ini juga berlaku di dalam ormek. Ruang untuk berbicara dan bergerak bagi perempuan lebih didengar dan bebas. Setidaknya inilah yang terjadi di HMI.

HMI merupakan ormek yang telah ada sejak tahun 40-an dan KOHATI, yang disebut sebagai alat HMI untuk menjalankan gerakan kesetaraan gender, telah dibentuk sejak tahun 60-an. Harus diakui bahwa relasi gender yang mulanya, secara umum dan sejak dulu, berlaku dalam masyarakat juga berlaku dalam HMI. Posisi perempuan yang masih sebagai 'warga negara kelas dua' membuat ruang gerak kader perempuan HMI menjadi terbatas. Tetapi kesadaran mengenai kondisi sedemikian rupa akhirnya mengemuka seiring dengan berjalannya waktu. Dimulai dari kesadaran satu orang, lalu mulai menyebar. Sampai akhirnya semakin meluasnya kesadaran itu, sebagai reaksi ketimpangan yang ada, yang juga diiringi dengan perubahan dan pergolakan dalam masyarakat, membuat HMI melalui KOHATI mulai mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender.

Berbeda dengan HMI, LMND sendiri merupakan hasil nyata, sebuah produk, dari rasa frustrasi secara keseluruhan terhadap sistem sosial yang dianggap timpang dan bobrok di setiap bidang kehidupan di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan organisasi ini terdiri dari individu-individu yang dari awal memiliki kesadaran gender, dan sepakat untuk mendukung gerakan kesetaraan gender.

Gerakan kesetaraan gender yang ada dalam LMND, sejalan dengan berdirinya organisasi itu sendiri, dianggap sebagai jawaban untuk mengatasi kesenjangan dalam masyarakat. Berawal perubahan dari dalam, untuk kemudian diarahkan keluar organisasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah adanya perubahan menuju suatu keadaan

yang dianggap ideal. Dimana hal ini semua terakomodasi dalam ideology LMND, yaitu demokrasi kerakyatan.

Gerakan kesetaraan gender dalam ormek juga mengandung aspek spread of generalized believes, dimana terdapat penyebaran isu sebagai sumber-sumber ketegangan. Isu tersebut adalah mengenai relasi gender yang tidak seimbang, sehingga cenderung menindas dan merugikan perempuan. Secara riil didalam ormek HMI, isu yang disebarakan adalah seputar terbatasnya perempuan untuk dapat mengisi posisi-posisi penting dalam kepengurusan organisasi. Wacana yang dikembangkan inimenumbuhkan serta menambahkan lebih lagi keyakinan bahwa memang diperlukan suatu gerakan menuju perubahan.

Keadaan ini kemudian memunculkan suatu gerakan yang pada mulanya dimulai oleh sosok-sosok yang memiliki kesadaran tinggi. Gerakan tersebut bertula dari diskusi-diskusi mulai dari tingkat yang informal, yaitu tidak terencana dan terkesan santai. Di HMI misalnya, diskusi-diskusi gender yang ada berawal dari perbincangan pribadi sesama kader perempuan HMI disetiap acara kumpul-kumpul HMI. Lalu berkembang menjadi diskusi terjadwal yang disebut sebagai 'kajian pencerahan', sampai pada seminar-seminar yang juga terbuka untuk umum. Demikian juga yang ada di LMND, dimana gerakan kesetaraan gender ini berawal dari diskusi-diskusi lorong. Diskusi dengan mengangkat isu-isu perempuan, terutama yang tengah berkembang dalam masyarakat.

Dengan dimulainya gerakan kesetaraan gender yang mengambil bentuk dalam wujud diskusi-diskusi ataupun seminar, akhirnya mulai diuji oleh berbagai pihak yang oleh Smelser tahapan ini disebut dengan The Operation of Social Control. Di HMI

gerakan kesetaraan gender yang dilakukan oleh KOHATI dalam berbagai bentuk mendapat reaksi pro dan kontra di internalnya sendiri. Keberadaan KOHATI sendiri dipertanyakan dan selalu digoyang oleh isu pembubaran. Dalam setiap kongres tahunan yang diadakan oleh HMI, selalu saja dihembuskan isu untuk pembubaran KOHATI yang keberadaannya justru dinilai bias gender.

Dilain pihak, gerakan kesetaraan gender dalam HMI melalui KOHATI masih mendapat apresiasi serta respon yang rendah dari kader laki-laki. Partisipasi kader laki-laki masih dirasa kurang dan sangat terbatas dalam gerakan ini. Pola pikir yang ada masih seputar "gerakan perempuan" yang berarti dari, oleh dan untuk perempuan semata.

Hal ini kontras dengan reaksi dari pihak luar organisasi terhadap wujud gerakan kesetaraan gender yang ada di HMI. Sambutan dari masyarakat terhadap forum seminar yang diadakan HMI dirasa cukup baik. Misalnya pada seminar KDRT yang mampu menarik perhatian masyarakat umum.

Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di LMND, respon yang tinggi dari internal LMND sendiri ternyata tidak dibarengi dengan apresiasi serupa dari masyarakat umumnya. Di LMND gerakan kesetaraan gender yang ada, dengan mengambil berbagai bentuk dan wujud, diterima oleh segenap anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari suasana persaingan sehat dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam LMND, misalnya untuk mengisi posisi-posisi strukturalis dalam organisasi.

Sedangkan dari luar organisasi, stereotype yang negative terhadap LMND itu sendiri, setidaknya di beberapa tempat tertentu yaitu di UNESA, menjadi penghambat bagi gerakan kesetaraan gender yang berusaha dikembangkan oleh LMND. Hal ini

membatasi ruang gerak organisasi dalam menyebarkan ideologi kesetaraan gender. Misalnya setiap forum informal yang mereka adakan, diskusi lorong atau sekedar diskusi diadakan di kantin, selalu dicurigai dan dipertanyakan oleh lingkungannya.

Kedua kenyataan yang dialami baik oleh LMND dan HMI tersebut diatas adalah yang apa yang disebut Smelser sebagai *The Operation of Social Control*. Disinilah gerakan kesetaraan gender yang ada dalam ornek diuji.

HMI dan LMND melalui keenam tahapan tersebut diatas dengan kondisi yang sedikit berbeda. Di HMI keenam tahapan Smelser dilalui sebagai reaksi atas apa yang terjadi di masyarakat umum. Disadari bahwa ketimpangan relasi gender yang terjadi di masyarakat juga ditemui dalam kehidupan berorganisasinya. Oleh karena itu perlu diadakan pembenahan.

Sedangkan di LMND, faktor eksternal yaitu fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat membangun tahapan-tahapan yang ada sehingga menghasilkan gerakan kesetaraan gender yang ada di LMND. Tahapan 1 sampai 4 dalam analisa Smelser, yang disebut dengan masa inkubasi, berasal dari fakta dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Struktur sosial yang patriarkis, krisis ekonomi yang lebih lagi menyulitkan kondisi perempuan, sampai terjadinya peristiwa Mei 1998 di Jakarta yang menjadikan perempuan sebagai obyek kekerasan merupakan pendorong kuat lahirnya gerakan kesetaraan gender di LMND.

Kelompok kepentingan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Penting adanya bagi mereka untuk memastikan kepentingan mereka dapat diakomodasi oleh pemerintah. Tapi selain itu, menurut Jane J Mansbridge, kelompok kepentingan juga memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi

anggota.<sup>1</sup> Dan masih menurut Mansbridge, kelompok kepentingan menghasilkan informasi-informasi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan di lain sisi juga menyediakan forum-forum pertimbangan yang membentuk preferensi para anggotanya.<sup>2</sup>

Kesetaraan gender dipandang sebagai sesuatu hal yang baik dan ideal, tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki. Mengadakan gerakan kesetaraan gender dalam organisasi memberikan manfaat bagi anggota kelompok kepentingan. Dan untuk selanjutnya juga memberi manfaat bagi organisasi itu sendiri, dapat berupa image yang bagus di mata masyarakat, sehingga nantinya dapat menarik lebih banyak massa.

Yang dilakukan di HMI belum dapat dikatakan sebagai suatu gerakan kesetaraan gender. Karena gerakan yang dilakukan lebih kepada level pembebasan posisi perempuan, tahapan awal untuk menuju gerakan kesetaraan gender. Hal ini juga dapat diidentifikasi dari ideologi yang melatarbelakangi gerakan tersebut di HMI, yaitu lebih kearah feminisme liberal. Sehingga yang diusahakan lebih kepada pembebasan posisi perempuan, belum menuju kepada tuntutan-tuntutan untuk posisi yang setara dengan laki-laki.

Sedangkan di LMND, gerakan kesetaraan gender yang ada lebih didasari oleh pemikiran feminisme sosialis. Sehingga isu yang mereka perjuangkan secara konkrit fokus pada perjuangan hak-hak buruh perempuan. Misalnya memperjuangkan cuti haid bagi buruh perempuan, ataupun memperjuangkan pembayaran upah penuh pada saat cuti melahirkan. Perjuangan ini mengambil bentuk pengajuan rancangan peraturan atau kebijakan secara formal, yang diperjuangkan bersama-sama serikat buruh yang ada di suatu perusahaan, yang mampu mengakomodasi kepentingan perempuan tersebut.

<sup>1</sup> Jane J Mansbridge, "A Deliberative Theory of Interest Representation" dalam "The Politics of Interest : Interest Groups Transformed", Mark P.Petracca - ed - , (Colorado:Westview Press, 1992), hal 32.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Ormek dalam hal ini melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender melalui pendidikan berupa diskusi ataupun seminar, merupakan proses pemberian informasi untuk memberikan pandangan-pandangan yang baru. Informasi yang diberikan ini nantinya diharapkan dapat merubah pola pikir yang telah ada, sehingga dapat merubah juga pilihan yang diambil.

Sebagaimana yang terjadi di HMI, gerakan gender yang ada dibiarkan mengalir apa adanya. Informasi yang ada disajikan apa adanya, tanpa pemaksaan, juga tanpa target bahwa setiap kader haruslah memiliki tingkat kesadaran gender yang sama. Begitu juga di LMND, semua pendidikan gender dilakukan tanpa paksaan. Meski mekanisme yang ada di LMND secara otomatis 'mengatakan' bahwa setiap pribadi yang bergabung dengan LMND memang sudah harus setuju dengan konsep kesetaraan gender. Dan LMND secara konkrit telah mampu menempuh langkah lebih jauh, dengan menerjemahkan bentuk kesetaraan gender secara riil dengan usaha untuk mewujudkan itu dalam bentuk kebijakan atau peraturan.

Dalam upaya mengartikulasikan kepentingannya kelompok kepentingan akan selalu berupaya untuk mencari bentuk-bentuk saluran yang efektif. Menurut Almond ada empat saluran penting bagi suatu kelompok kepentingan untuk mengajukan kepentingannya<sup>3</sup>, yaitu :

1. melalui demonstrasi yang bersifat fisik dan kekerasan.
2. melalui hubungan pribadi dengan sesama alumni, kawan lama, dan sebagainya.
3. melalui para elite yang mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan eksekutif ataupun para elite yang bersimpati pada mereka.

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti, "Perbandingan Sistem Politik", (Surabaya: Moephuso Grafika, 1984), hal. 101-104.

4. melalui saluran formal dan institusional seperti melalui lembaga eksekutif dan legislatif maupun media komunikasi.

Dalam ormek saluran yang digunakan untuk mengajukan kepentingannya adalah melalui hubungan pribadi dengan sesama anggota. Gerakan kesetaraan gender yang ada dalam ormek awalnya dimulai dari diskusi-diskusi pribadi, *sharing*, antar beberapa gelintir orang yang memiliki kesadaran gender. Lalu berkembang sedemikian rupa sehingga akhirnya secara resmi terakomodasi dalam organisasi. Meski juga dapat ditemui bentuk-bentuk gerakan kesetaraan gender yang disalurkan melalui demonstrasi, tetapi yang bersifat damai. Dan hal ini dilakukan secara kondisional, melalui momentum tertentu saja.

Sedangkan bentuk klasifikasi gaya dan sifat pengajuan gerakan kesetaraan gender yang ada dalam ormek bersifat manifest (bersifat terbuka dan terus terang sehingga mudah diketahui maksudnya), spesifik (jelas atau terperinci tentang apa yang diharapkan) dan umum (menyangkut kepentingan umum atau kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat). Hal ini berlaku sama, baik di HMI maupun di LMND.

Gerakan kesetaraan gender yang ada bersifat manifest, dapat dilihat dari bagaimana program-program kesetaraan gender itu tercantum dalam AD/ART ormek. Kemudian dituangkan secara nyata melalui materi-materi yang diberikan pada saat seseorang bergabung pertama kali dengan ormek. Di HMI materi ini diberikan mulai dari masa pengenalan anggota pertama kali sampai pada LK1 (Latihan Kader 1), sedangkan di LMND dimulai dari PCA (Pendidikan Calon Anggota).

Gerakan kesetaraan gender dalam ormek di HMI dan LMND juga bersifat spesifik karena secara jelas dan terperinci mengungkapkan apa yang menjadi tujuan.

Tujuan dari gerakan gender dalam HMI adalah terbinanya perempuan muslimah berkualitas insan cita. Yang berarti perempuan HMI diharapkan mampu mencapai posisi yang setara dengan anggota laki-laki lainnya, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang diyakini dalam HMI.

Sedangkan di LMND, yang ingin dicapai adalah perbaikan kondisi dan posisi kaum perempuan di Indonesia, sehingga dapat mencapai keadaan yang setara dengan laki-laki, tidak memiliki posisi yang stagnan sehingga diharapkan dapat turut ambil bagian dalam perombakan sistem.

Kesetaraan gender dianggap sebagai kebutuhan bersama, bersifat umum. LMND menambahkan, bahwa bukan hanya umum saja, tapi juga mendesak. Baik HMI maupun LMND menganggap kesetaraan gender sebagai masalah umum, masalah bersama dan tidak boleh dipandang sebagai gerakan yang dilakukan oleh perempuan untuk perempuan semata. Tapi pada prakteknya, yang terjadi dalam HMI adalah adanya kecenderungan dilakukannya gerakan-gerakan gender oleh kader perempuan saja. Partisipasi kader laki-laki masih rendah dalam kegiatan-kegiatan yang mengusung isu perempuan, yang dalam hal ini dilakukan oleh KOHATI.

Nilai-nilai kesetaraan gender yang digerakkan dalam ornek disosialisasikan dalam bentuk pendidikan, dan bukan indoktrinasi. Yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Di ornek secara nyata hal ini berupa forum diskusi dan seminar, baik secara formal ataupun informal.

Sosialisasi berupa pendidikan mengenai gender untuk membangun kesadaran gender ini disesuaikan dengan sasaran yang dituju. Misalnya di LMND, baik

pendekatan maupun materi yang disampaikan berbeda-beda tergantung siapa yang diajak bicara. Pada diskusi-diskusi antara sesama mahasiswa, yang disampaikan dapat berupa teori-teori feminisme, isu-isu gender yang tengah berkembang, atau bedah buku. Tapi bila berhadapan dengan buruh, dalam hal ini buruh perempuan, yang dilakukan adalah pendekatan secara personal dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan gender mereka sehari-hari. Kemudian bersama-sama dengan para buruh, anggota LMND memperjuangkan tuntutan itu melalui serikat buruh yang ada.

Sedangkan di HMI sosialisasi dalam bentuk pendidikan baik yang ditujukan untuk internal maupun eksternal HMI mengambil bentuk yang sama. Untuk internal organisasi, gerakan kesetaraan gender berupa kajian-kajian gender yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini untuk menjaga agar kesetaraan gender yang diharapkan tidak melenceng dari nilai-nilai Islam sendiri, dan juga budaya Indonesia. Selain itu diskusi gender yang dilakukan juga membahas mengenai penafsiran terhadap ayat-ayat yang dinilai keliru sehingga mendiskreditkan posisi perempuan. Sedangkan untuk gerakan kesetaraan gender yang diarahkan keluar organisasi biasa berupa seminar-seminar yang mengangkat isu-isu gender yang tengah mengemuka.

Sebagai ideologi yang tengah dikembangkan dengan upaya untuk merombak sistem sosial yang telah mapan sekian lama, gerakan kesetaraan gender dalam perjalanannya mengalami hambatan-hambatan, tidak terkecuali di ornek sendiri. Hambatan yang ada mulai dari yang bersifat teknis, organisasional maupun ideologi.

Dari segi teknis, pelaksanaan gerakan kesetaraan mendapat hambatan dari internal organisasi. Di HMI, kader laki-laki diakui kurang memberikan apresiasi atas bentuk-bentuk gerakan kesetaraan gender yang ada. Dalam kajian-kajian mengenai

gender yang diadakan oleh KOHATI, kehadiran kader laki-laki masih sedikit. Mereka masih berpikiran bahwa gerakan gender itu adalah gerakan dari perempuan untuk perempuan. Dan tidak hanya laki-laki, kaum perempuan HMI pun juga masih ada yang berkendala dalam mengikuti kegiatan yang ada, dengan alasan-alasan seperti kesulitan transportasi dan sebagainya.

Secara organisasional, di HMI keberadaan KOHATI sebagai organ perempuan yang mengusahakan gerakan kesetaraan gender sendiri masih dipertanyakan. Setiap kongres nasional HMI diwarnai isu untuk pembubaran KOHATI karena dianggap sebagai bias gender. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman mengenai gerakan kesetaraan gender yang tidak merata dikalangan anggota HMI itu sendiri.

Secara ideologi, Islam sebagai dasar HMI dinyatakan akomodatif terhadap nilai-nilai kesetaraan gender. Tetapi kemudian dikembalikan lagi bahwa tiap-tiap kader yang bergabung dengan HMI telah memiliki pola pikir yang berbeda-beda yang telah ada sekian lama sebelumnya. Untuk menyamakan persepsi inilah yang dianggap susah. Tetapi semua dikembalikan lagi pada pedoman bahwa Islam yang dianut HMI mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender, dengan berpegangan pada Surat Hujurat 13.

Di LMND, hambatan secara teknis dan organisasional justru bersifat sebab akibat. Secara teknis, pelaksanaan diskusi-diskusi mengenai isu gender mengalami hambatan karena keberadaan LMND itu sendiri. Di beberapa tempat, di UNESA misalnya, LMND mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitarnya. Gerak-gerak anggota LMND dibatasi, maka untuk mengadakan diskusi diantara sesama anak-anak LMND pun aktivitas tersebut dicurigai. Hal ini diakui sebagai kendala.

Sedangkan untuk faktor idiologi, asaz demokrasi kerakyatan yang diusung oleh LMND sangat akomodatif terhadap gerakan kesetaraan gender. Dimana dalam demokrasi kerakyat tercantum nilai-nilai kesetaraan, keadilan, serta kebebasan untuk berbicara yang berlaku sama untuk semua orang, dalam hal ini rakyat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari hasil penelitian mengenai dinamika gerakan kesetaraan gender di ormek ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan penting.

Pertama, gerakan kesetaraan gender yang ada dalam ormek secara langsung ataupun tidak langsung dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan perempuan yang diperjuangkan oleh badan internal dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pluralitas dalam organisasi. Di HMI gerakan gender dilakukan oleh KOHATI, terpisah dari HMI. Sedangkan di LMND, gerakan kesetaraan gender dilakukan oleh JNMP sehingga mereka dapat melebarkan sayap dan merangkul kaum buruh. Kenyataannya adalah gerakan kesetaraan gender dalam ormek tidak menyeluruh, atau dapat dikatakan hanya menyentuh sebagian anggota saja, yaitu perempuan. Hal ini dapat disebabkan karena gerakan kesetaraan gender mulanya diakomodasi oleh badan khusus yang diberi label ke-perempuan-an. Oleh karena itu, partisipasi laki-laki pada agenda ini cukup rendah. Sebagaimana yang terjadi di HMI.

Kedua, strategi yang dilakukan ormek dalam menggalang ideologi kesetaraan gender adalah melakukan sosialisasi dalam bentuk pendidikan dan lebih jauh lagi dalam bentuk pengajuan untuk dapat mengakomodasinya dalam bentuk kebijakan. Sosialisasi dalam bentuk pendidikan digunakan sebagai strategi utama menuju proses perubahan secara bertahap dan akan memakan waktu yang lama. Kesetaraan gender merupakan ideologi yang mencoba untuk

merekonstruksi sistem sosial yang telah mapan selama ini. Maka pergerakannya haruslah dalam bentuk yang berkesinambungan pula, karena perubahan tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Sedangkan lebih lanjut, terdapat tuntutan nyata untuk dapat mengakomodasi kepentingan perempuan dalam bentuk kebijakan, sebagaimana dilakukan oleh LMND.

Ketiga, hambatan gerakan kesetaraan gender didalam ormek terjadi secara teknis dan organisasional. Secara teknis, pelaksanaan agenda kegiatan yang berperspektif gender terhalang oleh keterbatasan dana. Hal ini terjadi baik di HMI maupun LMND. Secara organisasional, adanya tumpang tindih kebijakan antara cabang (*kota Surabaya, pen*) dengan pusat (*Jakarta, pen*) menghambat kelancaran agenda kegiatan. Hasilnya kegiatan-kegiatan berperspektif gender yang telah diagendakan tertunda, atau tidak terlaksana sama sekali. Hambatan secara organisasional lainnya adalah keterbatasan SDM dalam organisasi yang mau secara khusus terlibat dalam gerakan kesetaraan gender dalam ormek.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merasa bahwa masih terdapat fakta-fakta menarik yang dapat diungkapkan sehubungan dengan gerakan kesetaraan gender yang ada dalam ormek Penulis menyarankan bagi para peneliti yang lain, untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai kurang meratanya gerakan kesetaraan gender dalam ormek. Sehingga menimbulkan kesan bahwa gerakan kesetaraan gender adalah gerakan dari dan untuk perempuan semata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Culla, Adi Suryadi. 1999. *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Fakih, DR.Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irianto, Sulistyowati dan Sudiarti, Achie. 2004. *Konvensi Wanita di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kartono, Kartini. 1983. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni.

Magenda, Burhan D. 1995. *Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik : Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: LP3ES.

Murniawati, A.Nunuk P. 2004. *Getar Gender: Buku Kedua*. Magelang: IndonesiaTera.

Petracca, Mark P –ed-. 1992. *The Politics of Interest: Interest Group Transformed*. Colorado: Westview Press Inc.

Railon, Francois –terj Nasir Tamara-. 1985. *Politik dan Idiologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES.

Ridjal, Fauzi –ed-. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Saidi, Ridwan. 1993. *Kelompok Cipayung*. Jakarta: LSIP.

Sanit, Arbi. 1989. *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa: Refleksi dan Gagasan Alternatif*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.

Surbakti, Ramlan. 1998. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jala Sutra.

## JURNAL

Ancok, Djamalludin dan Mattulesi, Andi. 1997. 'Faktor-faktor Penyebab Gerakan Sosial Mahasiswa' dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan UNISIA* No.32/XVII/IV/1997. hal 88-105.

Singh, Rajendra. 2002. 'New Social Movement' dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* No.XI/2002. hal 14-27.

## LAPORAN PENELITIAN

Aribowo, Drs. 1997. *Sejarah dan Pola Gerakan Mahasiswa Indonesia*. Surabaya: Lembaga Penelitian UA.

## SKRIPSI

Sulaiman, M Yafis. 1999. *Mahasiswa dan Politik Orde Baru (Studi Tentang Fluktuasi Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Tahun 1990-1998)*. Surabaya : Fisip-UA.

## INTERNET

[www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)

## **Pedoman Wawancara**

- 1. Apa saja nilai yang dikembangkan dalam ormek ini?**
  - 2. Apa saja kepentingan yang ingin diartikulasikan dalam ormek ini?**
  - 3. Bagaimana keanggotaan dan kepengurusan dalam ormek ini?**
  - 4. Apa saja aktivitas yang dikembangkan ?**
    - 4.1. Bidang kegiatan?**
    - 4.2. Bentuk kegiatan?**
    - 4.3. Sasaran kegiatan?**
    - 4.4. Tujuan kegiatan?**
  - 5. Bagaimana pandangan ormek mengenai kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan diri serta hak-haknya dalam bidang :**
    - 5.1. Politik**
    - 5.2. Ekonomi**
    - 5.3. Sosial Budaya**
    - 5.4. Pertahanan Keamanan Nasional**
- serta peluang kesamaan dengan laki-laki dalam menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut ?**
- 6. Sejak kapan isu-isu perempuan mulai diagendakan dalam ormek?**
  - 7. Apa yang menjadi bahan pertimbangan untuk hal ini?**
  - 8. Apa tujuan yang ingin dicapai ormek dalam mengangkat isu-isu perempuan menuju kesetaraan gender?**
  - 9. Bagaimana strategi yang dilakukan ormek dalam menggalang ideologi kesetaraan gender?**
  - 10. Apa saja hambatan yang dihadapi ormek dalam usaha melakukan gerakan kesetaraan gender?**

**Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya  
Periode 2005 – 2006 (Demisioner)**

- Ketua Umum : Muhammad Afdillah
- Sekretaris Umum : Bagus Nusantoro Pranoto P
- Bidang Kebendaharaan : Dody Eka Saktiandy
  
- Kabid Penelitian dan Pengembangan (Litbang) :  
Arif Jaelani
- Kabid Pembinaan Anggota (PA) :  
Mahmudan
- Kabid Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) :  
Nuril Huda
- Kabid Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi :  
Anggoro Cipto Ismoyo
- Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) :  
M Toyyib Abraham
- Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah :  
Muhammad Nasir Parandy
- Kabid Komunikasi Umat (KU) :  
M.Khatib Rahman
- Kabid HAM dan Lingkungan Hidup (Hamdal) :  
M.Nizar
- Kabid Urusan Peranan Perempuan :  
Zumrotin

**Pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)  
Eksekutif Kota Surabaya Periode 2005 – 2010**

- Ketua : Anita
- Sekretaris : Toha Maksum S.Sos
  
- Departemen Pengembangan Organisasi (DPO) :  
Ilham Wahyudi
- Departemen Pendidikan dan Bacaan (DPB) :  
Tofan Aditya
- Departemen Dana dan Badan Usaha (DDBU) :  
Nur Fitriana (Vivi)
- Koordinator Jaringan Nasional Perempuan Mahardika (JNPM) :  
Nur Fitriana (Vivi)
- Koordinator Jaringan Kerja Kebudayaan (Jaker) :  
Irang Wahyudi